



# **REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2014-2019**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI RIAU**

**Jl. HR. SOEBRANTAS Km. 10 PEKANBARU**

# KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan syukurkehadirat Allah SWT, karena atas izin dan perkenan-Nya penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019 telah dapat diselesaikan.

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau Tahun 2014-2019 adalah instrumen perencanaan yang memberikan gambaran mengenai kebijakan dan kegiatan prioritas yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap bidang dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau, yang dilakukan secara terintegrasi, terkoordinasi dan terpadu, dan bertujuan untuk meningkatkan dan memantapkan pelaksanaan kegiatan prioritas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas PMD Provinsi Riau, dalam kerangka pelaksanaan kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Riau. Selanjutnya Renstra tersebut akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sesuai dengan skala prioritas.

Penyusunan Revisi Rencana Strategis ini berpedoman dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Semoga Revisi Rencana Strategis ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pelayanan publik bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Provinsi Riau dan bermanfaat sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, Februari 2018

**KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI RIAU,**



**Drs. H. SYARIFUDDIN. AR., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP : 19620504 198803 1 006



# DAFTAR ISI

Cover .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	v
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Strategis .....	5
<b>BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PMD</b>	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas PMD .....	9
2.2 Sumber Daya Dinas PMD .....	10
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas PMD Provinsi Riau .....	13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas PMD .....	23
<b>BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PMD Provinsi Riau .....	27
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	33
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/ Kota .....	36
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	46
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	51
<b>BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PMD.....	53
<b>BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	55
<b>BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	58
<b>BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	77
<b>BAB VIII. PENUTUP</b> .....	78



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b>	Jumlah ASN Berdasarkan Golongan .....	10
<b>Tabel 2.2</b>	Jumlah ASN Menurut Jabatan .....	11
<b>Tabel 2.3</b>	Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	11
<b>Tabel 2.4</b>	Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjurangan .....	12
<b>Tabel 2.5</b>	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Pendukung SKPD .....	12
<b>Tabel T-C.23</b>	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Periode Sebelumnya .....	13
<b>Tabel T-C.24</b>	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah DPMD Tahun 2009-2013 .....	16
<b>Tabel T-B.35</b>	Pemetaan Identifikasi Permasalahan Perangkat Daerah .....	27
<b>Tabel 3.1</b>	Tingkat Klasifikasi Desa Provinsi Riau Tahun 2015 .....	28
<b>Tabel 3.2</b>	Aspek Lingkungan Strategis .....	29
<b>Tabel 3.3</b>	Daftar Peraturan Perundang-undangan tentang Desa yang Diterbitkan Oleh Kementrian Dalam Negeri RI .....	38
<b>Tabel 3.4</b>	Nawa Kerja Prioritas Kemendes PDTT RI .....	45
<b>Tabel T-C.25</b>	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah DPMD Provinsi Riau .....	53
<b>Tabel 4.2</b>	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja DPMD Provinsi Riau 2014-2019 .....	54
<b>Tabel T-C.26</b>	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan .....	56
<b>Tabel T-C.27</b>	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif DPMD Provinsi Riau Tahun 2014 .....	62
<b>Tabel T-C.28</b>	Indikator Kinerja Dinas PMD yang Mengacu pada Tujuan Sasaran Perubahan RPJMD .....	77





**1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan, pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penetapan Undang-Undang tersebut mengandung konsekuensi bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dengan merumuskan rencana strategis (Renstra) dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan dan karakteristik daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Rencana strategis (Renstra) adalah rencana lima tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama yang menyangkut keunggulan, peluang, kendala, dan tantangan instansi pelaksana. Renstra diharapkan dapat diandalkan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Urusan Pemberdayaan dan Desa, sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 di atas, termasuk kepada urusan wajib non pelayanan dasar, Sehingga transformasi birokrasi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dengan konsekuensi pembentukan organisasi perangkat daerah pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Kemudian dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Selanjutnya ayat (2) disebutkan Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Selanjutnya, ketentuan amanah Pasal (277) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang



Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dengan terbitnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 di atas, merupakan pengganti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, mempunyai konsekuensi terhadap dokumen perencanaan Perangkat Daerah, harus menyesuaikan terhadap peraturan dimaksud. Disebutkan dalam Pasal (13) bahwa Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas PMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019 ini dilakukan dengan memperhatikan kondisi existing serta menyesuaikan perubahan internal dan eksternal yang terjadi baik di Provinsi Riau maupun Nasional. Sehingga diharapkan dapat menentukan arah dan orientasi dalam peningkatan kinerja Dinas PMD Provinsi Riau dan mampu menjawab tuntutan perkembangan kondisi lingkungan internal maupun eksternal selama beberapa tahun ke depan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau sebagai unsur pelaksana pemerintah Provinsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, memikul tugas yang begitu penting dalam pemberdayaan masyarakat dan desa. Sejalan dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, program dan kegiatan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan haruslah berkualitas dengan muara pada peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Oleh karena itu tujuan dan sasaran pembangunan daerah harus memperhatikan dinamika kebijakan yang berada pada lingkup nasional dan daerah maupun amanat pembangunan yang diberikan oleh Pemerintah. Alokasi sumber daya daerah harus mendukung penyelesaian masalah nasional maupun penyelesaian masalah yang ada di daerah masing-masing dalam rangka pencapaian “Nawa Cita” Bapak Presiden Joko Widodo melalui kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap dokumen perencanaan, salah satunya dengan penyusunan dokumen Revisi Renstra Dinas PMD Provinsi Riau. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Riau yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas PMD dalam rangka pencapaian visi Pemerintah Provinsi Riau.



## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara No. 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2016 No. 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang(RPJP) Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Riau Tahun 20014 – 2019;
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
17. Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Program Pembangunan Provinsi Riau;
18. Peraturan Gubernur Riau Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau;
19. Peraturan Gubernur Riau Nomor 109 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Riau dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau Tahun 2014-2019:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi pimpinan dan staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta urusan kewenangan setiap bidang dalam menyusun berbagai kebijakan, program, dan kegiatan dalam periode renstra.
2. Mengoptimalkan kualitas dokumen perencanaan dengan penyelarasan target dan pendanaan indikatif program dan kegiatan pada tahun yang telah dilaksanakan.





3. Mensinergikan seluruh potensi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan pelaksanaan program dan kegiatan secara terintegrasi, terarah, terukur dan bertanggung jawab.

Adapun tujuan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019 bertujuan untuk:

1. Meningkatkan dan memantapkan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas PMD Provinsi Riau, dalam kerangka pelaksanaan kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Riau.
2. Tersusunnya rencana program dan kegiatan yang berbasis pengendalian dan evaluasi yang berorientasi pada hasil dengan indikator yang telah ditetapkan.
3. Menyatukan sikap dan pandangan serta komitmen antara pimpinan dan staf dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya melalui perumusan tujuan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakan.

#### **1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Strategis**

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Poin ini mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah

#### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

#### 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Strategis

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PMD**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan



fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini. Bab ini terdiri dari:

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas PMD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

#### 2.2 Sumber Daya Dinas PMD Provinsi Riau

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

#### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas PMD Provinsi Riau

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas PMD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra perangkat daerah kabupaten/ kota (untuk provinsi) dan Renstra perangkat daerah Provinsi (untuk kabupaten/ kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah pada 5 tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PMD Provinsi Riau.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

#### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Bagian ini mengemukakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan



Perangkat Daerah, dijelaskan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bagian ini mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari : gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

## **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PMD;

Pada bagian ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25

## **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26. Tabel T-C.26 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.



## **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang disajikan dalam table T-C.27.

## **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel T-C.27.

## **BAB VIII. PENUTUP**

Pada bagian ini dikemukakan penegasan dan kata-kata penutup dari dokumen Renstra.



## **GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI RIAU**

---

### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau sebelumnya bernama Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa Provinsi Riau. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengakibatkan adanya transformasi dalam pembentukan organisasi perangkat daerah salah satunya pada urusan wajib non pelayanan dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kebijakan ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, Pasal 3 ayat 1 huruf d poin 11 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Dinas Tipe A dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Sub Bagian serta 4 (empat) Bidang dengan 12 (dua belas) Seksi dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat
  - Terdiri dari 3 ( tiga ) sub bagian, antara lain:
    - 1) Sub Bagian Perencanaan Program ;
    - 2) Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
    - 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - Terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu:
    - 1) Seksi Peningkatan SDM Lembaga Kemasyarakatan;
    - 2) Seksi Sosial Budaya Masyarakat dan Komunitas Adat;
    - 3) Seksi Keswadayaan Masyarakat.
- 4) Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan
  - Terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu:
    - 1) Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, BPD dan Kelurahan;
    - 2) Seksi Penataan dan Administrasi Desa dan Kelurahan;
    - 3) Seksi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.



5) Bidang Fasilitasi Keuangan, Aset dan Pendampingan Desa

Terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu:

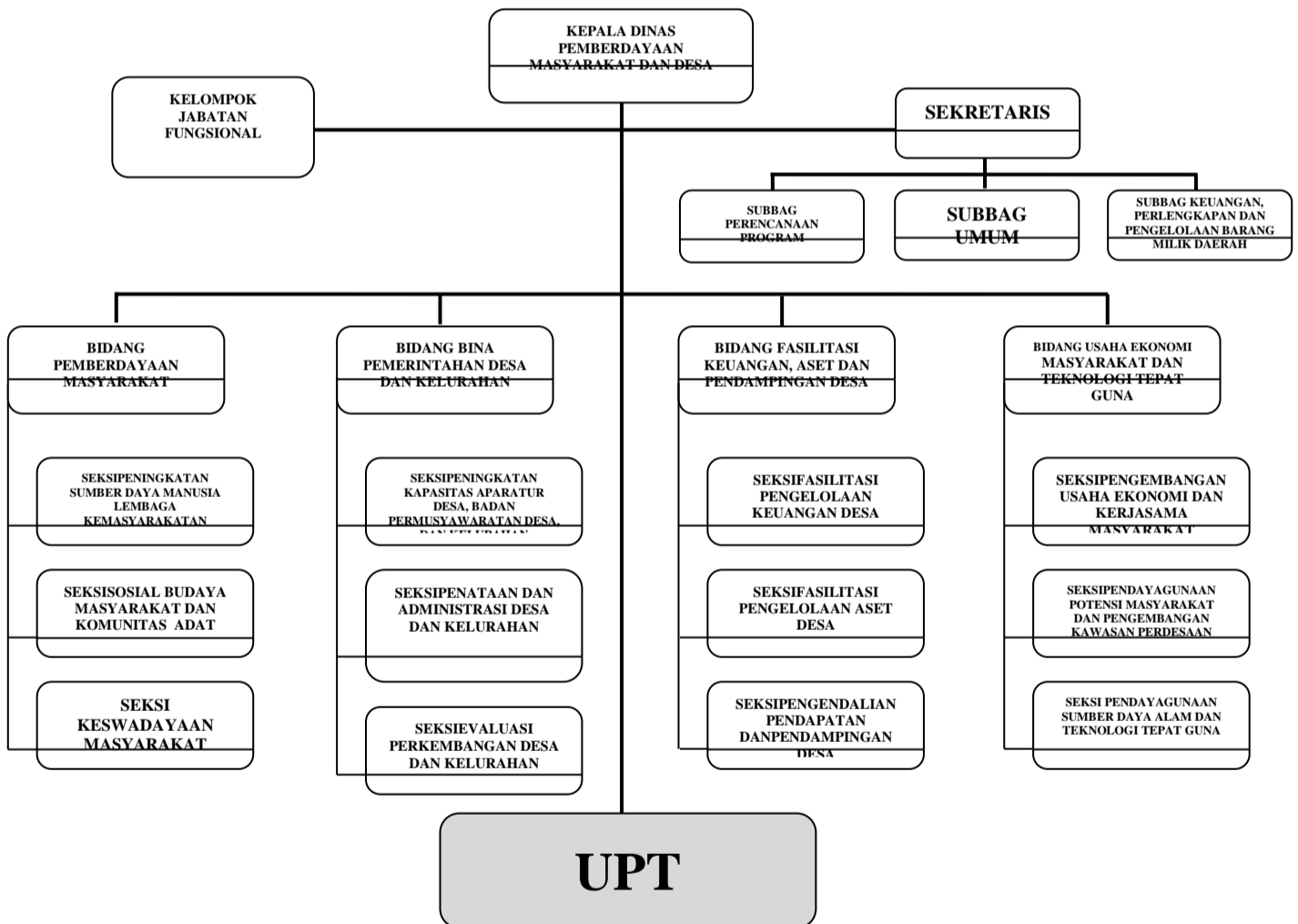
- 1) Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
- 2) Seksi Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa;
- 3) Seksi Pengendalian Pendapatan dan Pendampingan Desa.

6) Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan TTG

Terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu:

- 1) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Masyarakat;
- 2) Seksi Pendayagunaan Potensi Masyarakat dan Pengembangan Kawasan Perdesaan;
- 3) Seksi Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tepat Guna.

### STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI RIAU



Gambar1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau.



## 2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau

Sumber daya organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau merupakan suatu hal yang sangat penting dan menjadi faktor utama bagi setiap aktifitas organisasi sehingga dapat mewujudkan kinerja sebagaimana yang diharapkan. Sumber daya yang ada dengan kata kunci daya/energi (*power*) yang artinya dapat dimaknai dalam hal kemampuan, kekuatan, keberdayaan, peranan, kewenangan dan tanggung jawab. Sehingga sumber yang berarti sumber-sumber (*resources*) yang kaidahnya dalam manajemen dalam rangka pelaksanaan berbagai aktifitas untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Riau dalam uraian tugas dan fungsi. Sumber daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut:

### 2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, didukung dengan 100 orang Aparatur Sipil Negara dengan komposisi per 30 Desember 2016 sebagai berikut:

- a. Komposisi Aparatur Sipil Negara menurut Golongan Ruang

**Tabel 2.1**  
**Jumlah ASN Berdasarkan Golongan**

NO	GOLONGAN	JUMLAH (Orang)	%
1	Golongan I	1	1
2	Golongan II	18	18
3	Golongan III	64	64
4	Golongan IV	17	17
	<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Sub Bagian Umum Dinas PMD Tahun 2016

Berdasarkan data pada tabel 2.1, diketahui bahwa komposisi Aparatur Sipil Negara di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didominasi oleh golongan III, yang berjumlah 64 orang (64%). Dan selanjutnya diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil dengan Golongan II dan Golongan IV yang jumlahnya 18 orang dan 17 orang.

b. Komposisi Aparatur Sipil Negara menurut Jabatan/Esseloning.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah ASN Menurut Jabatan**

NO	GOLONGAN	JUMLAH (Orang)
1	Esselon II	1
2	Esselon III	5
3	Esselon IV	15
4	Fungsional Perencana Pertama	1
5	Staf/Fungsional Umum	78
	<b>Jumlah</b>	<b>100</b>

Sumber: Sub Bagian Umum Dinas PMD Tahun 2016

Dari sejumlah 100 orang ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau, terdapat 1 orang dengan jabatan eselon II, yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau; 5 orang dengan jabatan eselon III, yang terdiri dari Sekretaris dan 4 Kepala Bidang, serta 15 jabatan eselon IV, 1 orang fungsional perencana pertama dan yang lainnya adalah staf/fungsional umum. Kondisi existing terjadi penambahan 4 posisi Esselon IV yang sebelumnya hanya berjumlah 11. Hal ini sesuai dengan Susunan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 76 Tahun 2016.

c. Komposisi Aparatur Sipil Negara menurut Tingkat Pendidikan Formal

**Tabel 2.3**  
**Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Strata 3 (S-3)	-
2	Strata 2 (S-2)	22
3	Strata 1 (S-1)	42
4	Diploma III	15
5	SLTA/SMK/KPAA	20
6	SLTP	0
7	SD	1
	<b>Jumlah</b>	<b>100</b>

Sumber: Sub Bagian Umum Dinas PMD Tahun 2016

Jika dilihat pada tingkat pendidikan aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau, yang secara total berjumlah 100 orang, maka komposisi pegawai dengan pendidikan Sarjana S1 dan S2, berjumlah 64 orang atau sekitar 64% dari jumlah pegawai secara keseluruhan. Secara tingkat pendidikan, kondisi pegawai pada Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau mencerminkan sumber daya aparatur yang sudah baik, dan akan terus ditingkatkan.

d. Komposisi Aparatur Sipil Negara menurut Tingkat Pendidikan Penjurangan

Selain dari tingkat pendidikan, kondisi kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau dapat dilihat pada aspek pelatihan penjurangan. Adapun klasifikasi jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan penjurangan tercantum pada tabel 2.4 berikut:

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjurangan**

NO	NAMA PELATIHAN PENJEJANGAN	JUMLAH
1	DIKLATPIM IV	17
2	DIKLATPIM III	7
3	DIKLATPIM II	2
4	DIKLATPIM I	0
5	LEMHANAS	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>26</b>

Sumber: Sub Bagian Umum Dinas PMD Tahun 2016

Pada Tabel 2.4 terlihat bahwa untuk pelatihan penjurangan yang terbanyak telah diikuti adalah Diklatpim IV, yang telah diikuti 17 pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, atau sejumlah 17% dari total pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah mengikuti Diklatpim IV, sedangkan sebanyak 26 orang atau 43,41% staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah mengikuti pelatihan penjurangan.

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung oleh sarana dan prasarana kerja. Keadaan sarana dan prasarana kerja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Pendukung SKPD**

No.	Nama	Jumlah	Keterangan
1	Tanah	8.250 m <sup>2</sup>	
2	Mobil Dinas	5 Unit	
3	Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	868 Unit	
4	Alat-Alat Studio dan Komunikasi	46 Unit	
5	Alat-Alat Keamanan	1 Unit	
6	Bangunan Gedung	8 Unit	
7	Bangunan Air	1 Unit	
8	Instalasi	1 Unit	
9	Jaringan	1 Unit	



10	Buku Perpustakaan	469 Buah	
11	Barang bercorak Kesenian	9 Unit	

Sumber: Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Dinas PMD Tahun 2016

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau

Dalam kurun waktu 2014-2016 (3 tahun periode Renstra), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau yang sebelumnya bernama Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa Provinsi Riau telah menyelenggarakan pelayanan dibidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi yang didukung peran aktif aparatur sipil negara untuk pencapaian dan perwujudan pembangunan yang berkualitas dan berhasil guna. Terdapat 7 (tujuh) program yang menjadi Program Prioritas dalam penyelenggaran pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu:

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
5. Program Pembangunan Perumahan Pedesaan;
6. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan; dan
7. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.

Evaluasi kinerja capaian-capaian sasaran/taget renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau pada periode Renstra sebelumnya 2009-2014, dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini :

**Tabel T-C.23**  
**Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Periode Sebelumnya**  
**Renstra PD 2009-2014**

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	Pemantapan kelembagaan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat			1	Terbentuknya 149 Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan	30	30	30	30	30	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		2	Terlaksananya Pelatihan KPM dan P3MD bagi Aparat PMD	30 org	0	60 org	0	0	30 org	60 org	0	0	100 %	0	100 %	0	0		





NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-							
					2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014			
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
II	Mewujudkan tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat yang dinamis			1	Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BB-GRM)	11 kb/kt	11 kb/kt	11 kb/kt	11 kb/kt	11 kb/kt	11 kb/kt	11 kb/kt	11 kb/kt	11 kb/kt	100%	100%	100%	100%	100%			
III	Pengembangan kegiatan usaha ekonomi masyarakat melalui DUD dan Pasar Desa			1	Terbentuknya 972 Lembaga UED/KSP	128 Desa	119 desa	101 desa	127 desa	136 desa	128 Desa	119 desa	101 desa	127 desa	136 desa	100%	100%	100%	100%	100%		
				2	Terbentuknya 98 BUMDes	20	20	20	20	18	45	70	65	75	81	205%	350%	325%	375%	450%		
				3	Terlatihnya sebanyak 2.952 Pengelola UED/KSP	456 Org		430 org				456 Org		430 org			100%		100%			
				4	Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Pasar Desa bagi 1488 Desa, berpedoman pd Permendagri No. 42 Tahun 2007	60 org		0	20 Desa			60 org		0	20 Desa	100%	0	0	0	0	100%	0
IV	Peningkatan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat			1	Terlaksananya Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				2	Terbentuknya 151 Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)	28 Posyantek	26 Posyantek	0	0	12 Posyantek	28 Posyantek	26 Posyantek	0	0	12 Posyantek	100%	0	0	100%	100%		
				3	Terlatihnya 90 Pengurus Posyantek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
IV	Pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan			1 Tersedianya dokumen: - Profil Desa	0	0	0	10desa 2 kel	133desa 20 Kel	0	0	0	10desa 2 kel	133desa 20 Kel					100%	100%
				2 Terbentuknya 149 Pilot Project Pembangunan Desa Terpadu;				10desa 2 Kel					10desa 2 Kel						100%	
				3 Tersedianya Pergub tentang Pelaksanaan Otonomi Desa;	1 Per gub	0	0	0	0	1 Per gub	1 Per gub	1 Per gub	1 Per gub	1 Per gub	100%		100%	100%	100%	
				5 Terlaksananya Lomba Desa dan Kelurahan	10desa 2 Kel	10desa 2 Kel	10desa 2 Kel	10desa 2 Kel	10desa 2 Kel	10desa 2 Kel	10desa 2 Kel	10desa 2 Kel	10desa 2 Kel	10desa 2 Kel	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				6 Terselenggaranya Bimtek bagi 240 Aparatur Desa dan BPD	60org	60org	60org	60org	60org	60org	60org	60org	60org	60org	60org	100%	100%	100%	100%	100%
				7 Terselenggaranya Bimtek Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kel bagi 1488 Kepala Desa dan 223 Lurah.	0	1641 org	1641 org	1711 org	1711 org	0	1641 org	1641 org	1711 org	1711 org	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel di atas terlihat bahwa, hampir seluruh target pelayanan Perangkat Daerah pada target kinerja Renstra periode sebelumnya tercapai, namun dalam pelaksanaan program kegiatan belum secara optimal memenuhi sasaran yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan oleh berbagai faktor, terutama ketersediaan dana dan masih sulitnya dalam mengintegrasikan berbagai program kegiatan dengan lintas sektoral lainnya. Dari aspek pendanaan dan realisasi Anggaran pada periode sebelumnya sebagai mana terlihat dalam tabel berikut:



**Tabel T-C.24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau 2009-2013**

Sasaran Strategis	PROGRAM/ KEGIATAN		Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio antra Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan		
			2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	SEKRETARIAT																			
	<b>Program Pelayanan</b>	1	Penyediaan jasa surat menyurat	30,000,000	21,600,000	12,000,000	13,000,000	18,000,000	18,000,000	20,000,000	9,000,000	11,520,000	11,880,000	60	93	75	89	66	14,080,000	76
	<b>Administrasi</b>																			-
	<b>Perkantoran</b>																			-
		2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	379,992,000	455,920,000	390,600,000	361,680,000	363,540,000	327,008,638	263,258,698	279,227,357	141,394,976	190,929,122	86	58	71	39	53	240,363,758	61
																				-
																				-
		3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	46,958,000	50,000,000	67,005,000	50,000,000	157,350,000	35,108,690	49,692,000	60,306,450	48,394,000	121,939,573	75	99	90	97	77	63,088,143	88
																				-
																				-
		4	Penyediaan jasa kebersihan Kantor	88,800,000	90,000,000	200,000,000	155,000,000	167,981,000	65,100,000	90,000,000	199,957,700	154,764,000	201,576,200	73	100	100	100	120	142,279,580	99
																				-
																				-
		5	Penyediaan alat tulis kantor	140,000,000	194,391,400	125,000,000	137,500,000	165,000,000	139,293,921	193,481,000	124,861,000	137,307,500	129,260,000	99	100	100	100	78	144,840,684	95
																				-
																				-
		6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	112,982,500	103,204,000	75,000,000	65,000,000	92,000,000	107,683,945	93,006,000	74,467,600	64,079,000	63,226,250	95	90	99	99	69	80,492,559	90
																				-
																				-
		7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10,112,000	24,865,250	24,000,000	25,690,000	30,000,000	9,990,000	24,617,000	23,072,800	25,677,000	25,353,100	99	99	96	100	85	21,741,980	96
																				-
																				-
		8	Penyediaan makanan dan minuman	149,535,000	184,214,500	100,000,000	110,000,000	135,645,000	80,000,800	105,749,700	96,572,000	106,416,000	117,157,000	53	57	97	97	86	101,179,100	78
																				-
																				-
		9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	399,400,000	399,600,000	499,820,000	430,000,000	553,890,000	291,900,000	362,050,000	394,796,300	391,175,700	716,438,361	73	91	79	91	129	431,272,072	93
																				-
																				-



Sasaran Strategis	PROGRAM/KEGIATAN		Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio antra Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan		
			2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0	0	0	17,500,000	25,000,000	-	-	-	17,245,000	23,070,000	0.0%	-	-	99	92	8,063,000	38
		11	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor	0	0	0	26,400,000	26,400,000	-	-	-	26,400,000	92,400,000	-	-	-	100	350	23,760,000	90
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>	1	Pengadaan peralatan gedung kantor	100,000,000	100,000,000	80,000,000	125,000,000	152,100,000	-	98,228,000	74,077,000	121,132,000	123,904,000	-	98	93	97	81	83,468,200	74
	<b>Aparatur</b>	2	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	20,700,000	100,000,000	85,500,000	35,000,000	50,000,000	15,350,000	81,634,000	84,174,350	31,790,600	13,860,000	74	82	98	91	28	45,361,790	75
		3	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0	0	100,000,000	0	187,650,000			98,674,000	44,800,000	-	-	99	-	24	28,694,800	25	
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	73,350,000	74,850,000	0	0	82,550,000	64,630,000	72,409,000		35,640,000	88	97	-	-	43	34,535,800	46	
		2	Pengadaan pakaian khusus Hari-hari tertentu	67,800,000	0	0	0	73,400,000	58,620,000			86	-	-	-	-	-	11,724,000	86	
		3	Pengadaan pakaian olahraga Dan kelengkapannya	0	0	45,000,000	0	55,000,000			43,406,400		-	-	96	-	-	8,681,280	96	
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	1	Pendidikan dan pelatihan formal	150,000,000	103,200,000	100,000,000	160,000,000	217,500,000	70,126,364	81,000,000	68,789,200	126,600,200	102,610,600	47	78	69	79	47	89,825,273	64
		2	Pembinaan mental dan rohani	0	0	0	14,800,000	14,800,000				12,400,000	11,300,000	-	-	-	84	76	4,740,000	84
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	48,550,000	31,676,850	34,500,000	35,000,000	175,000,000	13,717,850	28,170,500	21,425,800	24,581,400	29,213,790	28	89	62	70	17	23,421,868	53
		2	Penyusunan pelaporan Keuangan semesteran	31,981,285	26,714,000	0	0	0	27,731,500	24,549,000	-	-	-	87	92	-	-	-	10,456,100	89



Sasaran Strategis	PROGRAM/KEGIATAN		Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio antra Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan			
			2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		3	Penyusunan pelaporan Keuangan akhir tahun	25,056,920	26,840,050	0	0	0	11,220,000	25,905,000	-	-	-	45	97	-	-	-	7,425,000	-	
		4	Penyusunan pelaporan Keuangan	0	0	35,000,000	28,000,000	37,000,000	-	-	33,615,000	26,728,600	27,313,750	-	-	96	95	74	17,531,470	88	
		5	Rapat teknis dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan PMDse Provinsi Riau	387,610,950	294,971,950	243,372,000	250,000,000	296,272,500	275,110,400	218,968,000	189,649,000	216,805,600	242,795,000	71	74	78	87	82	228,665,600	78	
		6	Monitoring/pemantauan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kelurahan tahun 2009/musrenbang desa/kelurahan	86,800,000	99,890,000	0	0	0	48,100,000	53,290,000	-	-	-	55	53	-	-	-	20,278,000	54	
Peningkatan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat	BIDANG TEKNOLOGI TEPAT GUNA																				
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat																				
	1	Pembinaan, monitoring dan evaluasi Posyantekdes	0	322,300,000	348,800,000	243,400,000	422,532,000	-	296,039,000	335,583,000	235,280,900	344,085,700	-	92	96	97	81	242,197,720	92		
	2	Gelar TTG nasional	5,000,000,000	308,383,000	450,000,000	385,000,000	461,337,500	3,160,483,042	299,548,150	440,346,600	353,096,200	264,956,600	63	97	98	92	57	903,686,118	81		
	4	Sosialisasi dan Penguatan Kelembagaan Posyantekdes	0	0	0	0	195,159,000														
	5	Pemetaan Kebutuhan TTG Pedesaan dalam rangka Pengembangan Produk Unggulan Desa	0	0	0	0	220,000,000														
	6	Lomba Inovasi TTG Tingkat Provinsi Riau	0	0	0	0	254,000,000														
	7	Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Riau Tahun 2013	0	0	0	0							287,822,800	-	-	-	-	87	57,564,560	87	





Sasaran Strategis	PROGRAM/KEGIATAN		Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan				
			2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		8	Orientasi Manajemen	0	0	0	0	165,000,000														
			Posyantek Percontohan di																			
			Provinsi Riau																			
Pemantapan kelembagaan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat	BIDANG LEMBAGA DAN ADAT																					
		1	Bulan Bakti gotong royong masyarakat (BB-GRM)	410,043,000	422,585,000	344,600,000	300,000,000	771,450,000	349,482,845	408,415,700	329,830,900	291,164,150	374,254,200	85	97	96	97	49	350,629,559	85		
		2	Pelatihan Pelatih Kader	174,400,000	0	193,700,000	175,000,000	250,000,000			177,892,200	160,196,000	152,316,600	-	-	92	92	61	98,080,960	81		
			Pemberdayaan Masyarakat dan P3MD se Provinsi Riau																			
		3	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan se prov. Riau	0	0	0	153,886,000	200,000,000				149,292,700	146,693,600	-	-	-	97	73	59,197,260	85		
		5	Bimbingan Teknis Penanggulangan HIV-AIDS	0	0	0	0	200,000,000														
			bagi lembaga kemasyarakatan se Provinsi Riau																			
Mewujudkan tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat yang dinamis		6	Peningkatan Peran Sosial POS YANDU dalam Pelayanan Masyarakat	0	0	0	0	300,000,000														
		7	Sosialisasi penyusunan perda tentang lembaga kemasyarakatan sebagai acuan pemerintahan desa tentang lembaga kemasyarakatan	77,609,000	0	0	0	0	75,437,000													



Sasaran Strategis	PROGRAM/KEGIATAN		Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio antra Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
			2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		8 Sosialisasi Permendagri No. 3 Tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat se Provinsi Riau	0	0	0	0	200,000,000						-	-	-	-	-	-	-
		<b>Program Peningkatan</b> <b>Partisipasi Masyarakat</b> <b>Dalam Pembangunan</b> <b>Desa</b>	1	0	0	2,000,000,000	0	0		1,833,514,200		3,189,040,750	-	-	92	-	-	-	92
		BIDANG UEM (Usaha Ekonomi Masyarakat)																	
		<b>Program</b> <b>Peningkatan</b> <b>Lembaga Ekonomi</b> <b>Pedesaan</b>	1	1,859,375,670	1,561,734,563	1,675,392,350	2,290,209,603	4,287,324,515	1,172,590,275	1,172,590,275	1,462,487,100		63	75	87	-	-	-	75
		Pembinaan dan evaluasi Program Pemberdayaan Desa se Provinsi Riau	2	395,891,700	173,063,045	150,000,000	130,000,000	457,900,000			118,554,000	116,862,100	89,578,200	-	-	79	90	20	63
		Fasilitasi program Pemberdayaan Desa	3	14,802,583,900	#####	14,803,921,245	14,423,044,210	16,228,439,995	13,852,889,200	13,852,889,200	14,044,420,900	14,067,074,200	94	85	95	98	-	-	124
		Pelatihan petugas pendampin lembaga ekonomi pedesaan	4	503,024,746	443,775,017	0	0	0	333,097,000	-	-	-	66	-	-	-	-	-	66
		Pembekalan Pengelola UED SP se Provinsi Riau	5	2,209,941,800	3,178,056,150	2,013,823,600	1,900,000,000	2,739,770,650	2,137,739,440	2,137,739,440	1,668,241,000	1,726,711,300	2,095,441,750	97	67	83	91	76	83
		Seleksi penerimaan tenaga pendamping	6	138,611,000	132,795,816	0	0	0	121,787,000	121,787,000	-	-	-	88	92	-	-	-	90



Sasaran Strategis	PROGRAM/KEGIATAN		Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio antra Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan				
			2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		7	Temu karya ketua pengelola UED-SP PPLEP pasca pendamping	428,546,250	0	0	0	0	386,350,608	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	90
		8	Pelatihan Aplikasi Software UED-SP PPD se Provinsi Riau	0	0	0	0	2,018,151,775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		9	Bimbingan Teknis Pengelola BUMDes se Provinsi Riau	0	0	0	0	626,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		10	Sosialisasi BUMDes se Provinsi Riau	0	0	0	0	1,374,013,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa</b>	1	Pembinaan Administrasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Provinsi Riau	1,079,764,300	1,058,599,215	1,058,000,000	865,000,000	1,663,009,000	-	-	847,720,800	830,610,400	1,059,068,600	-	-	80	96	64	547,479,960	-	80	
		2	Bimbingan Teknis Pengelola Pasar Desa se Provinsi Riau	73,788,900	213,954,500		200,000,000	662,599,520		208,738,000			188,214,100	-	98	-	-	28	79,390,420	-	63	
		3	Pemberdayaan Masyarakat melalui TN Manunggal Membangun Desa (TMMD)	204,900,000	362,625,000	0	0	0	53,548,900	348,998,800	-	-	-	26	96	-	-	-	80,509,540	-	61	
	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>	1	Operasional dan Pelaksanaan Tim Koordinasi dalam Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	865,753,150	600,000,000	0	0	0	587,074,000	436,319,500	-	-	-	68	73	-	-	-	204,678,700	-	70	



Sasaran Strategis	PROGRAM/KEGIATAN			Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan		
				2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan	BIDANG PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN																				
	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>	1	Penyusunan Pergub dan teknis pelaksanaan otonomi desa	472,500,000	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Program Peningkatan Lembaga Ekonomi Pedesaan</b>	1	Sosialisasi dan bimbingan teknis penyusunan dan Pendayagunaan data profil desa/kelurahan se Provinsi Riau	203,699,405	0	0	0	0	192,945,500	-	-	-	-	-	95	-	-	-	-	38,589,100	95
		2	Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa	190,214,500	0	0	0	0	168,301,550	-	-	-	-	-	88	-	-	-	-	33,660,310	88
		1	Perlombaan Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	836,762,164	886,208,304	450,000,000	350,000,000	878,975,000	671,600,287	775,000,100	412,599,700	323,571,000	464,628,300	80	87	92	92	53	529,479,877	81	
		2	Temu Orientasi Kepala Desa dan Lurah se Provinsi Riau	0	1,599,350,000	450,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	-	1,293,466,500	308,812,900	-	-	-	81	69	-	-	320,455,880	75	
		1	Mapping Analisis Potensi Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	0	0	300,000,000	0	0	-	-	278,866,200	-	-	-	-	93	-	-	55,773,240	93	
		2	Sinkronisasi, Pembinaan dan Evaluasi Pembangunan Desa Terpadu serta Fungsionalisasi Sekretariat	0	0	300,000,000	0	0	-	-	276,658,300	-	-	-	-	92	-	-	55,331,660	18	



Sasaran Strategis	PROGRAM/KEGIATAN		Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio antra Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan			
			2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		3	Sosialisasi dan Bimbingan dan Teknis serta Percepatan Penyusunan Data Profil Desa Kelurahan se Prov. Riau	0	0	0	220,000,000	450,000,000				206,278,500			-	-	-	94	-	41,255,700	94
		4	Pembinaan dan Pengembangan Pembangunan Desa/ Kelurahan Terpadu Binaan Pemerintah Provinsi Riau	0	588,120,500	350,000,000	350,000,000	360,598,000				309,805,100	224,576,900	-	-	-	89	62	106,876,400	75	
		5	Bimbingan Teknis Penyusunan RPJM Desa Kabupaten/ Kota se Provinsi Riau	0	0	0	0	389,991,000						-	-	-	-	-	-	-	-
				32,277,038,140	30,567,988,110	27,105,034,195	26,025,109,813	41,182,830,255	24,922,018,755	23,237,539,563	24,411,599,757	20,454,354,126	11,205,344,846	64.98	81.97	91.2	93.75	93.05			



#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau**

Berdasarkan hasil analisis kelembagaan yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau. Adapun berbagai tantangan kedepan yang perlu diantisipasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pencapaian program prioritas, antara lain:

- 1) Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Masalah utama yang dihadapi masyarakat miskin adalah terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap sumber daya alam dan menurunnya mutu lingkungan hidup, baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penunjang kehidupan sehari-hari.
- 2) Keterbatasan kapasitas aparatur penyelenggara Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam rangka pemberian pelayanan dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa/kelurahan.
- 3) Kinerja Lembaga kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan masih rendah dalam mendorong peran aktif masyarakat guna mengelola program-program pembangunan dalam rangka mewujudkan ketahanan masyarakat, termasuk masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia di perdesaan, seperti Kader Pemberdayaan Masyarakat, Kader PKK dan Kader Posyandu.
- 4) Kecenderungan menurunnya peranan dan fungsi lembaga adat sebagai penegak sistem nilai sosial budaya dalam kehidupan masyarakat lokal, sehingga memerlukan upaya pemantapan nilai-nilai sosial budaya masyarakat sesuai tradisi dan ada istiadat setempat seperti budaya gotong royong sebagai pedoman sikap dan perilaku masyarakat dalam kehidupan bersama.
- 5) Semakin menurunnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat dengan berkembangnya berbagai jenis penyakit menular, anak yang kurang gizi, meningkatnya penggunaan obat-obatan terlarang, dan masalah sosial kemasyarakatan lainnya, dapat berdampak pada menurunnya kualitas sumberdaya manusia. Untuk itu, perlu diupayakan pemenuhan hak-hak dasar penduduk, seperti kesehatan dan pendidikan serta peningkatan pendapatan keluarga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- 6) Kurang berkembangnya usaha ekonomi masyarakat di perdesaan, yang mengakibatkan rendahnya kondisi kehidupan ekonomi masyarakat sehingga



memerlukan upaya penguatan usaha ekonomi masyarakat dan usaha-usaha desa termasuk lembaga keuangan mikro masyarakat di perdesaan dalam penyediaan permodalan.

- 7) Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan, karena terbatasnya akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam lokal.
- 8) Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mendayagunakan teknologi tepat guna, sehingga tidak tercipta peningkatan produktivitas kerja dan peningkatan nilai tambah produk hasil usaha masyarakat. Hal ini memerlukan upaya pemasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pengembangan tugas pokok dan fungsinya, meliputi:

- 1) Kebijakan pemerintah sejalan dengan Nawa Cita ketiga Presiden Joko Widodo yaitu “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam kerangka Negara kesatuan”, merupakan rujukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau dalam mengembangkan dan melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- 2) Peran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada kegiatan perumusan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi implementasi dalam aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa/kelurahan, penguatan kapasitas lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial budaya dan peningkatan pelayanan sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna serta peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa/ pemerintahan kelurahan.
- 3) Pemerintah bersama masyarakat secara berkelanjutan mengembangkan berbagai program dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat dalam mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelayanan kesehatan termasuk penyediaan berbagai informasi dan pengembangan sumberdaya manusia di perdesaan.





- 4) Upaya pemberdayaan masyarakat miskin secara komprehensif menjadi komitmen utama dari seluruh jajaran aparatur yang mengemban tugas di bidang pembangunan perdesaan, sehingga secara proaktif merancang berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik masalah dan prioritas kebutuhan keluarga miskin. Upaya komprehensif dalam rangka pemberdayaan masyarakat (termasuk pemberdayaan masyarakat miskin), difokuskan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, yakni pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek politik, dan aspek lingkungan.
- 5) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menegaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan rangkaian yang utuh dan tidak terpisahkan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan secara nasional, dan merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta memiliki posisi strategis dalam mencapai keberhasilan berbagai kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat.
- 6) Pengesahan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi tonggak sejarah penting bagi pemerintahan desa, karena UU Desa menunjukkan komitmen nyata dan adanya *political will* dari negara untuk memberdayakan desa dan meningkatkan kesejahteraan seluruh perangkat desanya. *Political will* itu antara lain:
  - a) Adanya alokasi anggaran dari APBN untuk pembangunan desa sebagaimana dituangkan dalam pasal 71, setiap desa akan mendapatkan alokasi dana dari APBN sebesar 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK),
  - b). Adanya penghasilan tetap, tunjangan dan pemeliharaan kesehatan untuk kepala desa dan perangkat desa.
- 7) Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, termasuk penetapan kebijakan dan program-program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PMD PROVINSI RIAU

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan dan Desa dalam merumuskan sasaran dan kebijakan startegi tentunya bermula dari permasalahan dan isu-isu strategis sehingga arah kebijakan dan program kegiatan yang dilaksanakan berjalan efektif dan menjawab persoalan yang ada. Berikut hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis Dinas PMD sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

**Tabel T-B.35 Pemetaan Identifikasi Permasalahan Perangkat Daerah**

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	Sumber Daya Aparatur PMD	Masih kurangnya kualitas SDM ASN Dinas PMD dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	- Masih minimnya Diklat ASN yang mendukung tugas pokok dan fungsi - Penempatan pejabat dan pegawai belum berdasarkan keahliannya
2	Status Desa yang berkategori tertinggal masih relatif tinggi dan status desa yang berkategori mandiri belum ada	a) Belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. b) Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan, karena belum efektifnya pelaksanaan fungsi lembaga masyarakat dan Lembaga Adat (seperti LPM dan PKK) dalam menggerakkan partisipasi, menjaga ketahanan sosial dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan ( <i>Village Social Capital Development</i> ) c) Masih belum optimalnya peran Lembaga Ekonomi Desa (BUMDesa, Pasar Desa, Posyantek, UED/K-SP) dalam penurunan	a) Masih realtif rendahnya tingkat kapasitas aparatur desa dalam menunjang kinerja pemerintahan desa; b) Masih rendahnya kapasitas BPD sebagai lembaga pengawasan, legislasi dan penyalur aspirasi masyarakat; c) Masih Rendahnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat sebagai lembaga penggerak keswadayaan masyarakat di pedesaan; d) Masih Rendahnya Kapasitas Pengurus BUMDesa, Pengurus Pasar Desa, Pengurus Posyantek; e) Masih terbatasnya modal BUMDesa; f) Kualitas dan Kuantitas Kapasitas Pendamping Desa yang belum optimal; g) Belum adanya pelaksanaan Model Pembangunan Desa terpadu yang optimal, serta ego sektoral yang masih tinggi;



		<p>kemiskinan dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) sebagai sumber pendanaan pembangunan desa;</p> <p>d) Belum Optimalnya pembangunan dan pengembangan Desa Kawasan sebagai percepatan peningkatan ekonomi masyarakat desa</p> <p>e) Masih relatif sulitnya akses masyarakat terhadap kebutuhan sanitasi dan air bersih di kawasan desa pesisir;</p> <p>f) Kualitas Fasilitasi Pendamping Desa belum optimal dalam menggali potensi dan masalah masyarakat desa</p> <p>g) Masih sulitnya sinkronisasi dan sinergisitas program kegiatan urusan PMD dengan sektoral lainnya;</p>	
--	--	--	--

Dari tabel diatas terlihat bahwa, dua permasalahan pokok yang dihadapi oleh Dinas PMD Provinsi Riau dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, diantaranya adalah permasalahan organisasi yaitu Sumber Daya Aparatur PMD yang mendukung beban kerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, dan permasalahan tingkat keberdayaan masyarakat desa yang digambarkan oleh tingkat klasifikasi desa yang ada, sesuai data yang dikeluarkan oleh Kemeterian Desa PD TT RI yang tertuang dalam Permendesa PD TT Trans Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM). Klasifikasi Desa Provinsi Riau berdasarkan IDM adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Tingkat Klasifikasi Desa Provinsi Riau Tahun 2015

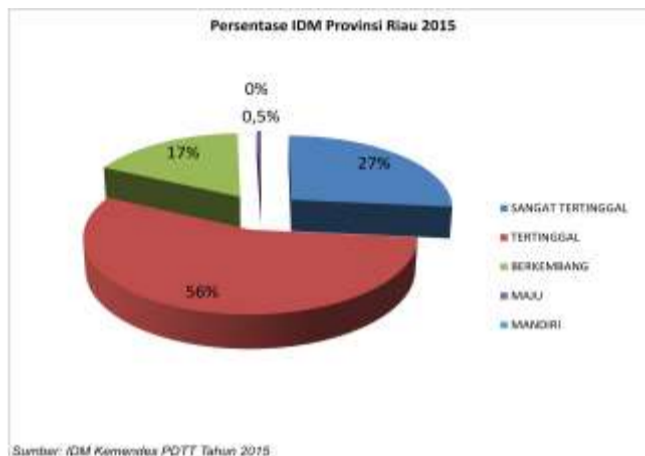
NO	KABUPATEN	SANGAT TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI	JUMLAH
1	KUANTAN SINGINGI	75	117	26	0	0	218
2	INDRAGIRI HULU	53	98	27	0	0	178
3	INDRAGIRI HILIR	62	111	25	0	0	198
4	PELALAWAN	27	65	12	0	0	104
5	S I A K	25	59	35	3	0	122
6	KAMPAR	52	140	48	2	0	242
7	ROKAN HULU	12	82	43	2	0	139
8	BENGGALIS	33	84	19	0	0	136
9	ROKAN HILIR	32	92	34	1	0	159
10	KEPULAUAN MERANTI	52	38	6	0	0	96



		423	886	275	8	0	1592
--	--	-----	-----	-----	---	---	------

Sumber: IDM Kementerian Desa PDTT RI 2015;

Grafik 3.1. Persentase Indeks Desa Membangun Provinsi Riau Tahun 2015



Dari tabel diatas terlihat bahwa, IDM desa pada kategori sangat tertinggal sebanyak 423 desa atau 17%, untuk desa yang berkategori tertinggal sebanyak 886 desa atau 56%, dan desa berkategori berkembang sebanyak 275 desa atau 27%, adapun desa yang berkategori maju masih 8 desa atau 0,5%, sedangkan desa yang kategori mandiri belum ada atau masih 0%.

Permasalahan dan isu strategis merupakan suatu proses yang digunakan dalam perencanaan strategis untuk memantau sektor lingkungan dalam menentukan peluang atau ancaman terhadap suatu organisasi atau instansi. Analisis lingkungan melibatkan sejumlah upaya memilah secara utuh menjadi bagian untuk mengetahui sifat dasar, fungsi dan hubungannya. Dengan mengadakan Analisis lingkungan, suatu perencanaan strategis organisasi atau instansi memiliki kesempatan untuk mengantisipasi masalah dan memanfaatkan peluang. Beberapa aspek lingkungan strategis yang akan mempengaruhi dan berkontribusi positif dalam menghadapi masalah tersebut diatas.

**Tabel 3.2 Aspek Lingkungan Strategis**

Aspek Lingkungan Strategis		
Aspek Politik	Aspek Ekonomi	Aspek Sosial
<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya <i>political will</i> dari negara untuk memberdayakan dan memprioritaskan Desa dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontribusi Desa sebagai daerah produksi dalam menunjang pembangunan daerah.</li> <li>Pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desa sebagai media menjaga pelestarian lingkungan hidup, ketahanan sosial, kearifan budaya lokal, dan keutuhan wilayah</li> </ul>



<p>Tentang Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perhatian dan Konsentrasi Pemerintah Daerah/Kepala Daerah Terhadap Pembangunan Desa yang dituangkan dalam Perubahan RPJMD Riau 2014-2019</li> </ul>	<p>menjadi wahana dalam pembangunan desa.</p>	
--	---	--

Dalam menghadapi lingkungan yang berubah, organisasi atau instansi diharapkan mampu melakukan analisis yang cermat tentang lingkungannya, baik lingkungan sekarang maupun lingkungan yang akan datang. Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap organisasi dapat dikategorikan: lingkungan mikro dan lingkungan makro, lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dan dalam kebutuhan analisis tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau, maka analisis terhadap lingkungan dibagi dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang uraiannya sebagai berikut :

#### **A. Lingkungan Internal**

Lingkungan Internal adalah Lingkungan di dalam Instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau sebagai Perangkat Daerah Provinsi Riau. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau terdiri dari 4 (empat) Bidang Tugas yaitu :

1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
2. Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
3. Bidang Fasilitasi Keuangan, Aset dan Pendampingan Desa;
4. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna.

Dalam kaitannya dengan bidang tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau, transisi Nomenklatur sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah tentunya berimbas pada kewenangan dan tupoksi organisasi. Disiplin ilmu dan jumlah pegawai yang dimiliki belum representatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa baik dari sisi manajemen pengelolaan keuangan dan aset, pengembangan lembaga ekonomi desa dan pendayagunaan potensi desa. Dinamika regulasi yang mengatur tentang Desa berkembang cukup pesat hingga akhir tahun 2016 sudah terbit 17 Permendagri dan 8 Permendes PDPTT. Perkembangan regulasi ini menjadi hal utama yang



harus dipertimbangkan bagi organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Riau.

## **B. Lingkungan Eksternal**

Pengenalan atau analisis terhadap lingkungan tersebut baik lingkungan internal dan lingkungan eksternal secara sederhana dilihat dalam diagram analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) yaitu Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Analisis SWOT merupakan gambaran kondisi dan situasi baik di lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dimana lingkungan internal instansi dalam analisa SWOT merupakan gambaran Kekuatan dan Kelemahan (*Strength, Weakness*). Sedangkan lingkungan eksternal merupakan gambaran Peluang dan Tantangan yang akan di hadapi oleh instansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Kekuatan (*Strength*) dalam analisa SWOT merupakan daya atau kemampuan dan kelebihan yang dimiliki oleh instansi dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan urusan kewenangan yang diberikan sekaligus untuk mengatasi kelemahan yang ada.

Kelemahan (*Weakness*) merupakan kekurangan yang ada dalam instansi, dalam hal ini yaitu kelemahan dan kekurangan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Setiap instansi memiliki kelemahan dan tidak dapat dihindari oleh setiap instansi. Kelemahan hanya dapat diatasi dengan sumber daya atau kelebihan yang ada di dalam instansi itu sendiri. Oleh karena itu, kelebihan atau kekuatan yang dimiliki oleh setiap instansi diharapkan melebihi kelemahan yang ada sehingga keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat dicapai.

Peluang (*Opportunity*) adalah kesempatan yang diperoleh oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau dari lingkungan eksternal untuk memaksimalkan dan mengembangkan kemampuan untuk meraih keuntungan dalam mendukung organisasi meraih keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Peluang yang diperoleh juga merupakan hasil dari kemampuan instansi dalam melihat atau memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki.



Pemanfaatan yang baik terhadap peluang atau kesempatan merupakan indikator penting bagi instansi untuk menjawab tantangan yang akan dihadapi oleh instansi dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Tantangan (*Threat*) merupakan kendala yang akan dihadapi oleh instansi. Tantangan yang akan dihadapi merupakan benturan terhadap tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tantangan ada yang dapat diperkirakan sebelumnya dan ada yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Tantangan yang dapat diperkirakan sebelumnya, dapat diminimalisir dengan memanfaatkan serta memaksimalkan peluang atau kesempatan yang diperoleh dari lingkungan eksternal. Tantangan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dapat dihadapi dengan memperbesar dan memaksimalkan daya atau kekuatan dan kelebihan dalam instansi.

### **Analisis SWOT**

#### **Kekuatan**

1. Komitmen pimpinan yang tinggi terhadap tujuan organisasi dengan seluruh pegawai.
2. Loyalitas aparatur dan alokasi anggaran yang memadai.
3. Sarana dan Prasarana serta lingkungan kerja yang memadai
4. Koordinasi yang baik dengan mitra kerja

#### **Kelemahan**

1. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang belum memadai dan optimal.
2. Distribusi pegawai Dinas PMD belum merata di bidang-bidang.
3. Ketersediaan dan pengelolaan data dan informasi di bidang Dinas PMD yang belum valid dan akurat.
4. Mekanisme pola kerja dan standar operasional prosedur (SOP) setiap bidang belum tertata dengan efektif dan efisien.
5. Belum optimalnya koordinasi antar bidang dalam perencanaan kegiatan sehingga sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi belum berjalan maksimal.





## **Peluang**

1. Dukungan Kepala Daerah dan DPRD Provinsi dalam pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Kebijakan otonomi daerah dan otonomi desa dalam upaya meningkatkan pemberdayaan.
3. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa dan masyarakat.
4. Perhatian pemerintah kepada Desa melalui berbagai paket program dan kebijakan.
5. Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
6. Adanya lembaga masyarakat pedesaan.

## **Ancaman**

1. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi dengan Dinas PMD Kabupaten.
2. Rencahnya kapasitas kompetensi dan moral sumber daya manusia perangkat desa.
3. Belum optimalnya tugas dan fungsi lembaga pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Kinerja lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan dalam pemberdayaan dan pembangunan masyarakat yang belum optimal.
5. Menurunnya peranan dan fungsi lembaga adat sebagai penegak sistem sosial budaya dalam kehidupan masyarakat lokal.
6. Lambatnya perkembangan usaha ekonomi masyarakat di perdesaan.
7. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam bergotong royong.
8. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mendayagunakan teknologi tepat guna.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Sejalan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desaselaku Perangkat Daerah Provinsi Riau yang dibentuk berdasarkan Peraturan



Daerah Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, menjelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau merupakan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Riau di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berperan dalam membantu Kepala Daerah.

Menelaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau 2005-2025 (sesuai UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025) merupakan kristalisasi komitmen dan kesepakatan seluruh lapisan masyarakat Riau sebagaimana dinyatakan dalam Visi Riau 2020 (sesuai Perda No. 36 Tahun 2001) yang relevan untuk melandasi pembangunan jangka panjang hingga tahun 2025, yakni:

**“Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan  
Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis,  
Sejahtera Lahir dan Bathin di Asia Tenggara Tahun 2020”**

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di provinsi Riau serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Gubernur yang hendak dicapai dalam periode kepemimpinan kedepan adalah meletakkan pondasi yang kuat dalam mewujudkan *“Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya melayu dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pematapan aparatur”*.

Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan Misi yang merupakan gambaran kegiatan yang akan dilakukan yang memungkinkan penyediaan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus untuk memelihara kesinambungan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur.
2. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan.



3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan.
4. Mengentaskan Kemiskinan.
5. Mewujudkan Pemerintahan yang Terpercaya (Handal).
6. Pembangunan Masyarakat yang berbudaya, beriman, dan bertaqwa serta Pemantapan Stabilitas Politik.
7. Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan.
8. Meningkatkan Penataan Lingkungan, Kebersihan dan Pariwisata.
9. Meningkatkan Penyediaan Listrik dan Air Bersih.
10. Meningkatkan Peran Swasta dalam Pembangunan.

Mengacu pada Visi dan Misi, maka ditetapkan Program Prioritas unggulan Kemasyarakatan yang Strategis untuk dibangun/dikembangkan yang diharapkan dapat segera memberikan kontribusi bagi implementasi pembangunan Provinsi Riau. Pencapaian sasaran dalam program pembangunan selain terarah melalui kebijakan, tantangan dan kendala serta pengaruh eksternal maupun internal yang akan dihadapi dengan Program Prioritas unggulan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.
2. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.
3. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.

Memperhatikan visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Riau di atas, masih cukup banyak agenda dan kebijakan yang masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut guna menjawab kebutuhan dan dinamika penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang harus terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Terlihat bahwa tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai konteks peran dan kepentingan daerah, memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi kepada ke sepuluh (10) Misi tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam upaya mencapai visi-misi kepala daerah tersebut diatas beberapa faktor yang menghambat dalam pencapaian visi dan misi tersebut diantaranya:

- 1) Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang belum memadai dan optimal.
- 2) Distribusi pegawai Dinas PMD belum merata di bidang-bidang.



- 3) Ketersediaan dan pengelolaan data dan informasi di bidang Dinas PMD yang belum valid dan akurat.
- 4) Mekanisme pola kerja dan standar operasional prosedur (SOP) setiap bidang belum tertata dengan efektif dan efisien.
- 5) Belum optimalnya koordinasi antar bidang dalam perencanaan kegiatan sehingga sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi belum berjalan maksimal.
- 6) Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi dengan Dinas PMD Kabupaten.
- 7) Rendahnya kapasitas kompetensi dan moral sumber daya manusia perangkat desa.
- 8) Belum optimalnya tugas dan fungsi lembaga pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 9) Kinerja lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan dalam pemberdayaan dan pembangunan masyarakat yang belum optimal.
- 10) Menurunnya peranan dan fungsi lembaga adat sebagai penegak sistem sosial budaya dalam kehidupan masyarakat lokal.
- 11) Lambatnya perkembangan usaha ekonomi masyarakat di perdesaan.
- 12) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam bergotong royong.
- 13) Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mendayagunakan teknologi tepat guna.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah PMD Kab/Kota**

#### **3.3.1. Kementerian Dalam Negeri**

Berdasarkan kesamaan tugas dan fungsi, maka penyusunan Rencana Strategis, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau mengacu pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2015-2019.

Adapun visi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri adalah adalah ***“Mewujudkan Pemerintahan Desa yang mampu Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat”***sedangkan Misi yang diemban adalah:



1. Memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa guna meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang ditunjukkan dengan pemenuhan SPM Desa;
2. Memantapkan peran perencanaan partisipatif dengan melibatkan aktif kelembagaan masyarakat desa dalam upaya pengentasan kemiskinan pada wilayah desa dan kawasan perdesaan;
3. Memantapkan tata kelola aset dan keuangan desa berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kemanfaatan;
4. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial budaya dan kerjasama masyarakat desa;
5. Meningkatkan kualitas evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan penyusunan peringkat tingkat perkembangan desa;
6. Meningkatkan kapasitas aparat dan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa lingkup regional.

#### **Arah Kebijakan Dan Strategi Kementerian Dalam Negeri**

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi. Terdapat 10 (sepuluh) poin arah dan kebijakan yang tertuang pada Renstra Kementerian Dalam Negeri 2015-2019. Berkaitan dengan urusan pemerintahan desa, tertuang pada poin 8 yaitu:

**Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui strategi:**

- a. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Peningkatan akuntabilitas, efektifitas, dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset desa;
- c. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan desa;
- d. Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerjasama desa;
- e. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa;



Terkait pemberdayaan masyarakat dan desa, telah dilaksanakan berbagai agenda, yaitu:

- (1) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- (2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa;
- (3) Peningkatan Pengembangan Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat; serta
- (6) Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.

Beberapa capaian dalam penyelesaian peraturan perundang-undangan yang telah dihasilkan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa antara lain:

**Tabel 3.3**  
**Daftar Peraturan Perundang-undangan tentang Desa Yang Diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia**

No.	Regulasi	Tentang
1	PP No. 43 Tahun 2014	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2	PP No. 60 Tahun 2014	Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3	PP No. 22 Tahun 2015	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4	PP No. 47 Tahun 2015	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5	Permendagri No. 111 Tahun 2014	Pedoman Teknis Peraturan di Desa
6	Permendagri No. 112 Tahun 2014	Pemilihan Kepala Desa
7	Permendagri No. 113 Tahun 2014	Pengelolaan Keuangan Desa



8	Permendagri Tahun 2014	No. 114	Pedoman Pembangunan Desa
9	Permendagri Tahun 2015	No. 81	Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
10	Permendagri Tahun 2015	No. 82	Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
11	Permendagri Tahun 2015	No. 83	Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
12	Permendagri Tahun 2015	No. 84	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
13	Permendagri 2016	No. 1 Tahun	Pengelolaan Aset Desa
14	Permendagri Tahun 2016	No. 44	Kewenangan Desa
15	Permendagri Tahun 2016	No. 45	Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
16	Permendagri Tahun 2016	No. 46	Laporan Kepala Desa
17	Permendagri Tahun 2016	No. 47	Administrasi Pemerintahan Desa

Dalam kaitan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang telah dilakukansudah mencapai hasil antara lain: cakupan area Penerapan PNPM-MPd yang mencapai 9.733 Kecamatan dengan berbagai capaian meliputi: kegiatan bidang sarana dan prasarana infrastruktur jalan perdesaan (termasuk jalan produksi pertanian dan pembukaan jalan baru) sepanjang 13.843 kilometer, sarana irigasi sepanjang 2.931 kilometer, pasar desa sebanyak 689 unit, sarana air bersih sebanyak 7.617 unit, listrik desa (PLTMH/PLTD/PLTS) sebanyak 379 unit, polindes sebanyak 2.506 unit, dan sekolah (TK-SD-SMP)/PAUD sebanyak 5.355 unit, kegiatan pengembangan simpan pinjam perempuan sebanyak 25.062 kelompok, dan kegiatan peningkatan usaha ekonomi masyarakat sebanyak 20.142 kelompok.

Dalam bidang penguatan kelembagaan pengembangan wilayah pedesaan; pelaksanaan pengisian Profil Desa secara *online* pada 26.664 desa di 400 kabupaten/kota; pelaksanaan musrenbangdes pada 61.000 desa pada 34





provinsi; Terfasilitasinya pengelolaan keuangan dan aset desa pada 910 desa pada 32 Provinsi; terangkatnya 44.063 sekretaris desa sebagai PNS pada 33 Provinsi; Berfungsinya Lembaga Keuangan Mikro Bukan Bank dan Bukan Koperasi (LKMB3K) pada 25 Provinsi dan LKM pada 8 provinsi; Terbangunnya 191 pasar desa di 30 provinsi, 135 kabupaten; Terbangunnya 7.099 unit UED-SP yang tersebar di 23 Provinsi 137 Kab, 831 Kecamatan, 5.260 Desa; Alih Fungsi 158 UED-SP menjadi BUMDesa;

Pengembangan Proyek percontohan Pelestarian Adat dan Budaya Nusantara di 7 Kabupaten 48 Pokmas selain itu ada 18 Kabupaten persiapan lokasi proyek percontohan dengan 36 Pokmas; Pilot Project Pelestarian Adat dan Budaya dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa di 9 Kabupaten; Fasilitasi Komunitas Adat Terpencil (KAT); Pelaksanaan Pembinaan Posyandu melalui Penguatan Kapasitas Pokjnal Posyandu terhadap 355 Aparat Pemerintah Daerah;

Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Desa (Posyantekdes) pada 118 lokasi percontohan; Fasilitasi pengembangan Proyek Desa Mandiri Energi (DME) dengan memanfaatkan Tanaman Jarak Pagar (*Jatropha Curcas lin*) kotoran ternak sebagai energi alternatif (biogas) melalui pelatihan kepada kelompok masyarakat di beberapa desa percontohan.

### **3.3.2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi**

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia adalah kementerian dalam struktur Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengacu pada Permendes No. 6 Tahun 2015 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.



Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berdasarkan pada Permendes No. 6 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, penyiapan pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi.
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
6. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
7. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

### **Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Bidang Desa dan Kawasan Perdesaan**

Adapun sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2015-2019 adalah: berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa. Arah kebijakan dan strategi pembangunan desa dan kawasan perdesaan tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:



**a. Pembangunan Desa**, mencakup:

- 1) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa sesuai dengan kondisi geografis Desa, melalui strategi: menyusun dan memastikan terlaksananya NSPK SPM Desa (antara lain perumahan, permukiman, pendidikan, kesehatan, perhubungan antar permukiman ke pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi, pengairan, listrik dan telekomunikasi).
- 2) Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa, melalui strategi:
  - (i) penataan dan penguatan BUMDesa untuk mendukung ketersediaan sarana prasarana produksi khususnya benih, pupuk, pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa;
  - (ii) fasilitasi, pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan; dan
  - (iii) meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna Perdesaan.
- 3) Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa untuk mendukung peningkatan karakter jati diri bangsa melalui revolusi Rancangan Awal Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan strategi:
  - (i) mengembangkan pendidikan berbasis keterampilan dan kewirausahaan;
  - (ii) mendorong peran aktif masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan;
  - (iii) mengembangkan kapasitas dan pendampingan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat secara berkelanjutan;
  - (iv) menguatkan partisipasi masyarakat dengan pengarusutamaan gender termasuk anak, pemuda, lansia dan penyandang disabilitas dalam pembangunan desa;
  - (v) menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan;



- (vi) meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, lingkungan keamanan dan politik;
- (vii) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan desa; dan
- (viii) meningkatkan partisipasi dan kapasitas tenaga kerja (TKI/TKW) di desa.

**b. Pembangunan Kawasan Perdesaan**, mencakup:

- 1) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan untuk mendukung kedaulatan pangan, melalui strategi:
  - a) menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa-desa dan distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan;
  - b) menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi;
  - c) menyiapkan dan melaksanakan kebijakan untuk membebaskan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan;
  - d) menyiapkan dan melaksanakan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan;
  - e) menyiapkan dan melaksanakan kebijakan-regulasi baru tentang shareholding antara pemerintah, investor, dan desa dalam pengelolaan sumber daya alam;
  - f) menjalankan program-program investasi pembangunan perdesaan dengan pola shareholding melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham;
  - g) merehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar dan terkena dampak bencana khususnya di daerah pesisir dan daerah aliran sungai.
- 2) Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota dengan strategi:



- a) mewujudkan dan mengembangkan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata;
- b) meningkatkan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah; 38 Rancangan Awal Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- c) mengembangkan kerjasama antardesa, antardaerah, dan antarpemerintah dan swasta termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa (melalui pembentukan lembaga BUM Desa Bersama atau kerjasama antar 2 BUM Desa); dan
- d) membangun agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk pertanian, UMKM, dan Koperasi;
- e) membangun sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan;
- f) mengembangkan komunitas teknologi informasi dan komunikasi bagi petani untuk berinteraksi dengan pelaku ekonomi lainnya dalam kegiatan produksi panen, penjualan, distribusi, dan lain-lain.

**c. Pengawasan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan dengan strategi:**

- 1) Konsolidasi satuan kerja lintas Kementerian/Lembaga;
- 2) Memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa, dan semangat UU Desa, termasuk penyusunan PP Sistem Keuangan Desa;
- 3) Memastikan distribusi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berjalan secara efektif, berjenjang, dan bertahap;
- 4) Mempersiapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat.

**d. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Pembangunan Sumber Daya Manusia, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa Penguatan Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa melalui strategi:**

- 1) Melengkapi dan mensosialisasikan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;



- 2) Meningkatkan kapasitas pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan kader pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan;
- 3) Menyiapkan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa.

**Tabel 3.4**  
**Nawa Kerja Prioritas Kemendes PDTT RI**

No.	NAWA KERJA PRIORITAS KEMENDES PDTT
1	Peluncuran “Gerakan Desa Mandiri” di 5.000 desa pada tahun 2015
2	Pendampingan dan Penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa dengan menyediakan tenaga pendamping sebanyak 84.000 orang;
3	Pembentukan dan pengembangan 5.000 BUMDES;
4	Revitalisasi Pasar Desa di 5.000 desa/kawasan perdesaan;
5	Pembangunan Infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk unggulan di 5.000 Desa Mandiri;
6	Penyiapan implementasi penyaluran Dana Desa Rp. 1,4 miliar per desa secara bertahap;
7	Penyaluran Modal bagi Koperasi/UKM di 5.000 Desa;
8	Pilot project sistem pelayanan publik jaringan koneksi online di 5.000 desa;
9	“Save villages” di daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan, terluar dan terpencil.

### 3.3.3. Perangkat Daerah PMD Kabupaten/Kota

Kabupaten/kota di Provinsi Riau bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan pedesaan di Provinsi Riau, karena pada prinsipnya desa/kelurahan adalah wilayah yang dimiliki oleh Kabupaten/kota. Dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan perlu ada sinkronisasi sehingga pembangunan yang dilaksanakan bisa berjalan efektif dan efisien.

Dalam telaah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap Renstra PMD 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau pada prinsipnya telah



mempunyai kesamaan visi-misi yakni Pemberdayaan dan Pembangunan masyarakat pedesaan dalam upaya peningkatan kemandirian masyarakat desa.

Namun disisi lain dengan adanya pengaturan perangkat daerah melalui Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terdapat berbagai variasi tipe perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau. Sehingga dengan beban kerja yang cukup besar nantinya akan mempengaruhi kinerja dari penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di daerah.

Dari paparan di atas, maka disimpulkan bahwa Telaahan berbagai dokumen rencana strategis dengan instansi vertikal memiliki interkoneksi dengan Revisi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau, antara lain:

1. Adanya kesamaan visi yaitu ingin mewujudkan kemandirian masyarakat terutama melalui pengembangan, infrastruktur, sarana dan prasarana pedesaan dan upaya pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang berbasis sumber daya lokal.
2. Adanya kesamaan pemahaman untuk memprioritaskan penataan pemerintahan Desa melalui peningkatan kapasitas menuju otonomi Desa yang nyata.

Dari telaahan terhadap sasaran akhir yang ingin diwujudkan adalah adanya kemampuan dan kemandirian yang terwujud dalam kehidupan masyarakat di Perdesaan dengan memanfaatkan potensi yang terdapat di daerahnya serta adanya harmonisasi antara nilai-nilai budaya setempat dengan nilai lain yang bermanfaat untuk mendorong pelaksanaan pembangunan.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Dalam pengembangan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kedepan akan selalu memperhatikan Aspek Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sehingga pada bagian ini perlu dilakukan telaah terhadap RTRW dan KLHS. Provinsi Riau dimekarkan menjadi dua (2) yaitu Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau Daratan sebagai provinsi induknya. Kedua provinsi ini memiliki karakter wilayah yang berbeda dimana Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari beberapa pulau sedangkan Provinsi Riau Daratan sebagian besar merupakan daratan, perbedaan kondisi





fisik ini mengakibatkan perbedaan juga dalam dukungan prasarana wilayah seperti akses Jalan yang lebih panjang untuk wilayah daratan demikian juga untuk dukungan prasarana wilayah lain dengan dilakukannya analisa persandingan untuk provinsi ini diharapkan dapat memberikan gambaran dukungan prasarana terhadap rencana pembangunan melalui RTRW dan sebaliknya.

Provinsi Riau pertama kali menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada Tahun 1991 dan disahkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Riau melalui Perda Nomor 10 Tahun 1994, dengan masa berlaku selama 15 tahun yakni tahun 1994 hingga tahun 2009. Dengan terbitnya Undang-Undang Penataan Ruang dan adanya pemekaran Provinsi Riau dengan Provinsi Kepulauan Riau menyebabkan terjadinya perubahan pola dan struktur ruang Provinsi Riau, sehingga diperlukan revisi terhadap Perda Tata Ruang tersebut. Meski RTRW Provinsi Riau 1994-2009 telah habis masa berlakunya, namun hingga sekarang revisi RTRW Provinsi Riau masih dalam proses penyelesaian dikarenakan belum diperolehnya persetujuan perubahan pola ruang kehutanan dari Menteri Kehutanan RI. Meskipun demikian, perencanaan pembangunan wilayah Provinsi Riau telah diselaraskan dengan rancangan RTRW dimaksud, dimana aspek struktur dan pola ruang telah mengacu pada RTRW Nasional dan RTR Pulau Sumatera.

Dengan demikian, selain merupakan proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan, penataan ruang, sekaligus juga merupakan produk yang memiliki landasan hukum untuk mewujudkan tujuan pengembangan wilayah. Melalui instrumen ini pula maka daya dukung lingkungan dari suatu wilayah menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam rangka perwujudan wilayah Provinsi Riau sebagai pusat-pusat kegiatan sesuai dengan fungsi dan skala pelayanan yang diharapkan.

Dalam rancangan RTRW Provinsi Riau 2014-2033, telah dirumuskan rencana sistem perkotaan yang meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp), serta Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Selain itu juga telah ditetapkan beberapa kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi, dan kawasan strategis kabupaten/kota yang dalam upaya perwujudannya memerlukan perhatian khusus, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.



### **Permasalahan RTRW dengan TGHK**

1. Adanya Desa-desa tua yang berada di dalam kawasan Konservasi dan Hutan Lindung (Desa batu Sanggan di Kabupaten Kampar yang berada pada Suaka Margasatwa Bukit Rimbang-Baling, dan Desa Pangkalan Indarung di Kabupaten Kuantan Singingi yang berada pada kawasan Hutan Lindung).
2. Desa-desa dan lahan usaha/kebun masyarakat yang berada di dalam Kawasan Hutan Produksi (Desa Pinggir di Kabupaten Bengkalis yang berada didalam areal konsesi HTI, Kebun masyarakat Desa Tasik Serai di Kabupaten Bengkalis yang berada diareal konsesi HTI).
3. Terdapatnya Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung yang kondisinya sudah tidak mungkin lagi dipertahankan (Suaka Margasatwa Balai Raja di Kabupaten Bengkalis, Hutan Lindung Mahato).
4. Beberapa wilayah Pengembangan Pemekaran Pedesaan yang terdapat didalam kawasan hutan, (Kecamatan Minas Barat dan Kota Minas dan Kecamatan Sungai Sembilan di Kota Dumai).

#### **3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Program dan rekomendasi yang dihasilkan dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Provinsi Riau telah dilakukan terhadap indikasi kebijakan dan rencana program sebagaimana berikut:

1. Penataan Ruang Kawasan Perbatasan-Darat Wilayah Provinsi Riau bertujuan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perbatasan darat dengan provinsi berbatasan;
2. Penataan Ruang Kawasan Pesisir dan Lautan Wilayah Provinsi Riau dengan tujuan meningkatkan pengelolaan pengembangan & pemanfaatan berbagai potensi SDA pesisir & lautan wilayah Riau sebagai sektor unggulan yg diprioritaskan secara nasional;
3. Penataan Ruang Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Provinsi Riau dengan tujuan memperbaiki kualitas ekosistem DAS untuk mencegah/mengurangi terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan untuk menjaga fungsi hidrologis tanah guna menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan;



4. Penataan Kawasan Perbatasan Antar Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Riau bertujuan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan penataan ruang dan penanganan berbagai permasalahan kawasan perbatasan antar kabupaten/kota;
5. Pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar Wilayah Provinsi Riau dengan tujuan penyiapan rencana-rencana umum dan studi kelayakan pengembangan berbagai prasarana dan sarana dasar wilayah sebagai persiapan awal pelaksanaan pembangunan fisik, dan sebagai wahana koordinasi di antara pembina prasarana dan sarana;
6. Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Ruas-ruas Jalan Arteri Primer bertujuan meningkatkan kapasitas pelayanan ruas-ruas jalan Arteri Primer eksisting yang memiliki arti penting dalam menggerakkan perekonomian daerah dan pengembangan wilayah;
7. Pembangunan Baru Jalan dan Jembatan pada Ruas-ruas Jalan Arteri Primer bertujuan membuka akses ke kawasan-kawasan potensial baru dan atau menyediakan alternatif jalur lalu-lintas cepat yang baru ke lokasi-lokasi penting/strategis;
8. Peningkatan Jalan dan Jembatan pada ruas-ruas Jalan Kolektor Primer bertujuan meningkatkan kapasitas pelayanan ruas-ruas jalan Kolektor Primer eksisting yang memiliki arti penting dalam menggerakkan perekonomian daerah dan pengembangan wilayah;
9. Pengembangan Jalan dan Jembatan pada ruas-ruas Jalan Kolektor Primer bertujuan membuka akses ke kawasan-kawasan potensial baru dan atau menyediakan alternatif jalur lalu-lintas kecepatan sedang yang baru ke lokasi-lokasi penting/strategis;
10. Pengembangan Sistem Interkoneksi Penyediaan Energi Listrik Wilayah Riau bertujuan, penyiapan rencana-rencana umum dan studi kelayakan pengembangan prasarana, dan sarana penyediaan energi listrik secara terpadu;
11. Pemutakhiran dan Pengembangan Basis Data (*database*) Geospasial dengan tujuan tersedianya berbagai informasi keruangan yang lebih mutakhir dan lengkap bagi keperluan perencanaan tata ruang dan pelaksanaan program-program pengembangan wilayah.



Berdasarkan telaahan RTRW dan KLHS diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau melakukan pendekatan program berdasarkan tipe desa yaitu sebagai berikut:

1. Tipe Desa Nelayan (DNL)

Adalah desa yang sebagian besar kehidupan penduduknya bergantung pada potensi laut.

2. Tipe Desa Persawahan (DPS)

Adalah desa yang sebagian besar kehidupan penduduknya bergantung pada potensi pertanian sawah, baik yang berpengairan teknis, non teknis maupun tadah hujan.

3. Tipe Desa Perladangan (DPL)

Adalah desa yang sebagian besar kehidupan penduduknya bergantung pada potensi pertanian, tanah kering (ladang/tegalan) baik ditanami padi maupun palawija.

4. Tipe Desa Perkebunan (DPB)

Adalah desa yang sebagian besar kehidupan penduduknya bergantung pada potensi pertanian tanaman keras (lebih dari satu musim) dan monokultur.

5. Tipe Desa Peternakan (DPT)

Adalah desa yang sebagian besar kehidupan penduduknya bergantung kepada potensi peternakan.

6. Tipe Desa Kerajinan/Industri Kecil (DIK)

Adalah desa yang sebagian penduduknya bergantung kepada potensi industri kecil atau kerajinan.

7. Tipe Desa Industri Sedang dan Besar (DIB)

Adalah desa yang sebagian besar penduduknya bergantung kepada potensi industri sedang dan atau besar.

8. Tipe Desa Jasa dan Perdagangan (DJP)

Adalah desa yang sebagian besar penduduknya bergantung pada potensi perdagangan dan jasa.

Sedangkan dalam menentukan prioritas program berdasarkan kepada kalasifikasi desa yang terdiri dari:



1. Desa swadaya (tradisional) adalah desa yang belum mampu mandiri dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga sendiri, administrasi desa belum terselenggara dengan baik.
2. Desa Swakarya (transisional), adalah desa setingkat lebih tinggi dari desa swadaya. Pada desa swakarya ini mulai mampu mandiri untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri, administrasi desa sudah terselenggaranya dengan cukup baik dan LPM cukup berfungsi dalam mengorganisasikan dan menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan secara terpadu.
3. Desa Swasembada (berkembang), adalah desa setingkat lebih tinggi dari pada desa Swakarya. Desa swasembada adalah desa yang telah mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri, administrasi desa sudah terselenggara dengan baik, LPM telah berfungsi dalam mengorganisasikan dan menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa secara terpadu.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Dalam Upaya Penentuan isu-isu Strategis dalam Lingkup Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau. Untuk melaksanakan urusan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan upaya untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Riau, perlu dikedepankan kerangka berpikir yang dapat menentukan isu-isu Strategis yang ada sebagai berikut:

- a) Masih Rendahnya kualitas SDM ASN PMD Provinsi Riau dalam mendukung Tugas dan Fungsi Dinas PMD;
- b) Masih relatif tingginya jumlah desa tertinggal di Provinsi Riau yakni sebanyak 886 desa atau 56%, dan desa yang kategori mandiri belum ada atau masih 0%.

Penetapan isu-isu strategis tersebut dilakukan melalui suatu proses analisa dengan mereview kembali faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan badan pemberdayaan masyarakat ditinjau dari rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau, Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau sebagai dasar



acuan dalam pengambilan dan penetapan isu-isu strategis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Dalam konsep penataan ruang daerah Provinsi Riau dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pemanfaatan kawasan sangat penting dalam penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau guna mencapai arah kebijakan dan sasaran jangka menengah daerah. Dampak dari penetapan tersebut juga memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam penentuan dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.



## **TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PMD Provinsi Riau**

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2014-2019, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau sebagai berikut :

Tujuan : “Mempercepat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menuju Kemandirian Desa di Provinsi Riau”

Sasaran : 1. Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menuju Desa Mandiri di Provinsi Riau;

**Tabel T-C.25**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Taget Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
				I	II	III	IV	V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mempercepat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menuju Kemandirian Desa di Provinsi Riau	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menuju Desa Mandiri di Provinsi Riau	<b>Persentase Desa Tetinggal di Provinsi Riau</b>	<b>55%</b>	<b>50%</b>	<b>45%</b>	<b>40%</b>	<b>35%</b>
			<b>Jumlah Desa Mandiri</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>



**Tabel.4.2**  
**Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan**  
**Desa Provinsi Riau 2014-2019**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Mempercepat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menuju Kemandirian Desa di Provinsi Riau	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menuju Desa Mandiri di Provinsi Riau	<b>Persentase Desa Tertinggal di Provinsi Riau</b>	<b><u>Jumlah Desa se Provinsi Riau</u> x 100%</b> <b>Jumlah Desa Tertinggal</b>
			<b>Jumlah Desa Mandiri</b>	<b>Jumlah Desa Mandiri di Provinsi Riau</b>





## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

---

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2014-2019, dilaksanakan melalui kebijakan strategi yang merupakan kebijakan prioritas dan diturunkan kedalam program-program strategi. Kebijakan strategi yang dirumuskan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Mendorong terwujudnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa melalui Pengembangan Bumdes Mandiri;
2. Mendorong terwujudnya Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui Pendayagunaan SDA dan TTG;
3. Mendorong terwujudnya keberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui fasilitasi Pengembangan Kawasan Pedesaan;
4. Mendorong meningkatnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPM/K) dalam peningkatan Partisipasi masyarakat di Perdesaan;
5. Mendorong meningkatnya peran Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa/Kelurahan dalam peningkatan Partisipasi Perempuan dalam pembangunan di Perdesaan;
6. Mendorong meningkatnya peran Lembaga Adat Desa/Kelurahan dalam peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di Perdesaan;
7. Mendorong meningkatnya profesionalisme Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Mendorong meningkatnya akutabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
9. Mendorong terwujudnya ASN profesional, pengelolaan keuangan dan Perencanaan yang berkualitas dalam mendukung pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;



Perumusan kebijakan strategi pada organisasi menjadi pedoman dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang selanjutnya memunculkan arah kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan input, output, outcome serta impact dari perencanaan yang dilakukan. Adapun rincian tujuan, sasaran dan indikator Jangka Menengah Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

**TABEL T-C.26**  
**TUJUAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN**

Visi : Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya Melayu dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur			
Misi : Menurunkan Kemiskinan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mempercepat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menuju Kemandirian Desa di Provinsi Riau	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menuju Desa Mandiri di Provinsi Riau	1. Mendorong terwujudnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa melalui Pengembangan Bumdes Mandiri;	1. Penguatan SDM Pengurus BUMDesa 2. Pendampingan 3. Penguatan Badan Hukum BUMDesa 4. Fasilitasi Modal BUMDesa
		2. Mendorong terwujudnya Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui Pendayagunaan SDA dan TTG;	1. Pemetaan Kebutuhan TTG Provinsi Riau; 2. Meningkatkan Inovasi Alat-alat TTG 3. Meningkatkan Pemasyrakatan TTG; 4. Fasilitasi Alat TTG dalam pengelolaan SDA dan pengembangan Usaha masyarakat
		3. Mendorong terwujudnya Keberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui fasilitasi Pengembangan Kawasan Pedesaan;	1. Pemetaan Pengembangan Desa Kawasan Provinsi Riau 2. Fasilitasi Pengembangan Desa Kawasan Provinsi Riau
		4. Mendorong meningkatnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPM/K) dalam peningkatan Partispasi masyarakat di Perdesaan;	1. Penguatan SDM LPM/K; 2. Penguatan - Pendampingan
		5. Mendorong meningkatnya peran Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa/Kelurahan dalam peningkatan Partispasi Perempuan dalam pembangunan di Perdesaan;	1. Penguatan SDM PKK; 2. Penguatan Pendampingan
		6. Mendorong meningkatnya peran Lembaga Adat Desa/Kelurahan dalam peningkatan Partispasi masyarakat terhadap pembangunan di Perdesaan;	1. Penguatan SDM PKK; 2. Penguatan Pendampingan



		7. Mendorong meningkatnya profesionalisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Kapasitas Aparatur PMD;</li> <li>2. Penguatan Kapasitas Kepala Desa</li> <li>3. Penguatan Kapasitas Aparatur Desa;</li> <li>4. Penguatan Pendampingan</li> </ol>
		8. Mendorong meningkatnya Akutabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi Peningkatan Akutabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa;</li> <li>2. Penguatan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan aset Desa;</li> </ol>



## **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Rencana program dan kegiatan, disusun berdasarkan pedoman yang ada dan mengacu pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Dokumen Perencanaan, baik dari tingkat Pusat maupun Provinsi Riau yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagai upaya untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif atas dasar kebutuhan nyata Masyarakat untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang berimplikasi pada terwujudnya Provinsi Riau sejajar dengan Provinsi Maju dikawasan Barat Indonesia, selanjutnya strategi yang akan ditempuh dapat dijabarkan melalui 10 (sepuluh) Program dan 72 (tujuh puluh dua) kegiatan sebagai berikut:

### **PROGRAM DAN KEGIATAN NON URUSAN**

- |            |  |
|------------|--|
| <b>I</b>   | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                            |
| 1          | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |
| 2          | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |
| 3          | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional     |
| 4          | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor  |
| 5          | Penyediaan Alat Tulis Kantor   |
| 6          | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      |
| 7          | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             |
| 8          | Penyediaan Makanan dan Minuman   |
| 9          | Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi dan publikasi Dinas PMD Provinsi Riau |
| 10         | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                         |
| 11         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     |
| 12         | Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor                                       |
| <b>II</b>  | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                     |
| 13         | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor  |
| 14         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor                                 |
| 15         | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor                           |
| 16         | Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana penunjang Kantor             |
| 17         | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor                                      |
| 18         | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional  |
| <b>III</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                                 |
| 19         | Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya                              |
| 20         | Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu                              |
| <b>IV</b>  | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                    |
| 21         | Pendidikan dan Pelatihan Formal  |
| 22         | Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur  |



**V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- 23 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 24 Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun
- 25 Rapat Teknis dalam rangka Koordinasi & Sinkronisasi Program/Kegiatan PMDse- Provinsi Riau
- 26 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
- 27 Penyusunan rencana strategis (RENSTRA) SKPD

**PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB**

**I Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat**

- 1 Peningkatan Kapasitas LPM se Provinsi Riau
- 2 Peningkatan kapasitas lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)se-Provinsi Riau
- 3 Pelatihan Pelatih Kader Pemberdayaan Masyarakat se-Provinsi Riau
- 4 Bulan Bhakti Gotongroyong Masyarakat (BB-GRM ) Tingkat Provinsi
- 5 Penilaian Lomba Pelaksanaan Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Riau
- 6 Pelatihan Metodologi Bagi Pelatih Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Muda
- 7 Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Peserta Pelatih Pelatihan Kader PemberdayaanMasyarakat se-Provinsi Riau
- 8 Study Sistem Nilai-nilai Budaya Masyarakat Tempatan terhadap Pembangunan di ProvinsiRiau
- 9 Monitoring Penetapan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Riau.
- 10 Pemetaan Kebutuhan TTG Perdesaan
- 11 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Posyantek
- 12 Monitoring dan Evaluasi Posyantek
- 13 Lomba Posyantek Tingkat Provinsi Riau
- 14 Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Riau
- 15 Orientasi Manajemen Posyantek
- 16 Sosialisasi HAKI Bagi Inovator dan Pengelola Posyantek se-Provinsi Riau
- 17 Pembangunan Pusat Informasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna Provinsi Riau
- 18 Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Riau
- 19 Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional
- 20 Pemasyarakatan dan Penguatan Kelembagaan Program Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (PAMSIMAS)
- 21 Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat Melayu Riau
- 22 Pengembangan Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Riau (KP-SPAMS)
- 23 Faslitasi Percepatan dan Pembedayaan Masyarakat diwilayah Perhutanan Sosial Pedesaan Provinsi Riau
- 24 Gelar Teknologi Tepat Guna
- 25 Peningkatan Pelayanan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Dinas PMD Provinsi Riau

**II Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun**



## **Desa**

- 26 Perlombaan Desa dan Kelurahan
- 27 Penyusunan, Pendayagunaan dan Validasi Data Profil Desa/Kelurahan
- 28 Provinsi Riau
- 29 Peningkatan Pelayanan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Dinas PMD Provinsi Riau

## **III Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa**

- 30 Penyusunan Data Profil Desa/Kelurahan
- 31 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa se-Provinsi Riau
- 32 Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) Manajemen Pemerintah Desa
- 33 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Desa
- 34 Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- 35 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa/Perdes (Legal Drafting Perdes)
- 36 Rapat Koordinasi Penyerahan Kewenangan Urusan Kab/Kota kepada Desa/Kelurahan
- 37 Penyusunan Naskah Akedemis dan Draf RANPERDA Desa Adat
- 38 Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Desa Mandiri
- 39 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- 40 Bimbingan Teknis Penyusunan RPJMDes dan RKPDes Bagi Aparatur Desa se- Provinsi Riau
- 41 Pembinaan terhadap Kab/kota dalam rangka Pemberian Dana Desa
- 42 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 43 Pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan wilayah desa
- 44 Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
- 45 Raker Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
- 46 Bimbingan Teknis PTPD (Pembina Teknis Pemerintah Desa)
- 47 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa
- 48 Bimbingan Teknis Manajemen Aset Desa
- 49 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa, ADD dan Bantuan Keuangan Provinsi Riau
- 40 Peningkatan Kapasitas Pendamping Profesional Desa se Provinsi Riau

## **IV Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan**

- 51 Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa se - Provinsi Riau
- 52 Pembinaan dan Evaluasi UED-SP
- 53 Studi Evaluasi Program Pemberdayaan Desa
- 54 Rakor Pasar Desa se-Provinsi Riau
- 55 Bimbingan Teknis Pengelolaan Bumdes se-Provinsi Riau
- 56 Monitoring Evaluasi Bumdes Se-Provinsi Riau
- 57 Fasilitasi Pengembangan BUMDes Provinsi Riau
- 58 Fasilitasi Pengembangan BUMDesa Mandiri Provinsi Riau
- 59 Fasilitasi Usaha Ekonomi Masyarakat Berbasis Teknologi Tepat Guna (TTG) Pedesaan di Provinsi Riau
- 60 Pemetaan Pembangunan Kawasan Pedesaan

## **V Program Pengembangan Data/ Informasi**

- 61 Penyusunan Data dan Informasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa



**Tabel T-C.27**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN**  
**PENDANAAN INDIKATIF DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI RIAU TAHUN 2014-2019**

Tujuan	Sasaran	NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA	LOKASI		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Mempercepat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menuju Kemandirian Desa di Provinsi Riau	Terwujudnya ASN Profesional, Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan yang berkualitas dalam mendukung pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	100 %	100 %	100 %	2.708.00	100 %	3.169.00	90 %	2.915.92	100 %	2.116.29	100 %	2.116.29	98 %	13.026	Dinas	PMD		
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang dikirim	3715	1150	1150	15.00	1150	18.00	1150	10.00	230	12.00	35	10.00	3715	65				
					Surat/	Surat/	Surat/		Surat/		Surat/		Surat/		Surat/		Surat/					
					Dokumen	Dokumen	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen					
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rentang waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	304.00	12 Bulan	355.00	12 Bulan	364.00	12 Bulan	240.00	12 Bulan	240.00	60 Bulan	1503				
		3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	11 Mobil	29 Mobil	7 Mobil	171.00	7 Mobil	201.00	5 Mobil	144.00	11 Mobil	192.00	11 Mobil	192.00	11 Mobil	900				
					Dinas	Dinas	Dinas		Dinas		Dinas		Dinas		Dinas		Dinas					
		4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	251.00	12 Bulan	293.00	12 Bulan	425.00	12 Bulan	320.00	12 Bulan	320.00	60 Bulan	1609				
		5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rentang waktu penyediaan alat tulis kantor	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	401.00	12 Bulan	470.00	12 Bulan	381.00	12 Bulan	105.00	12 Bulan	105.00	60 Bulan	1462				
		6	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Rentang waktu penyediaan barang cetak dan pengadaan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	76.00	12 Bulan	89.00	12 Bulan	90.00	12 Bulan	110.00	12 Bulan	110.00	60 Bulan	475				
		7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rentang waktu penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	30.00	12 Bulan	36.00	12 Bulan	36.00	12 Bulan	40.00	12 Bulan	40.00	60 Bulan	182				



Tujuan	Sasaran	NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA	LOKASI		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan Minuman yang disediakan	24078 Porsi	Porsi	1500	150.00	1550	175.00	1550	157.00	9125	130.00	10353	130.00	24078	742				
		9	Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi dan publikasi dan kehumasan SKPD	Rentang waktu penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan.	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	176.00	12 Bulan	205.00	12 Bulan	235.00	12 Bulan	193.00	12 Bulan	195.00	60 Bulan	1004				
		10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	612 Kali	146 Kali	146 Kali	995.00	146 Kali	1,164.00	110 Kali	897.00	110 Kali	583.00	100 Kali	583.00	612	4222				
		11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rentang waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	30.00	12 Bulan	36.00	12 Bulan	36.92	12 Bulan	42.12	12 Bulan	42.00	60 Bulan	187.04				
		12	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa Tenaga keamanan kantor	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	109.00	12 Bulan	127.00	12 Bulan	140.00	12 Bulan	149.17	12 Bulan	149.29	60 Bulan	674.46				
		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja.	100%	100%	100%	4,269.00	100%	805.00	88%	731.00	100%	419.01	100%	356.16	98%	6,546	Dinas PMD			
		1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	261 Unit	55 Unit	55 Unit	176.00	60 Unit	205.00	84 Unit	267.00	9 Unit	59.00	53 Unit	73.16	261 Unit	780.16				
		2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah pengadaan alat dan Perlengkapan Gedung Kantor	0	Kompt.	Kompt.	228.00	Kompt.	267.00								495				
		3	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas / operasional	0	2 Unit	2 Unit	1,000.00										1000				
		4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	262 Unit	25 Unit	25 Unit	20.00	30 Unit	23.00	39 Unit	36.00	84 Unit	28.00	84 Unit	15.00	262 Unit	122				





Tujuan	Sasaran	NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA	LOKASI		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Penunjang Kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang dirawat / service	3 Jenis	Komputer, Print, FC & Fax	Kompt, Print, FC & Fax	30.00	Kompt, Print, FC & Fax	36.00						-	3 Jenis	66				
		6	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	94 Unit	30 Unit			30 Unit	206.00	15 Unit	307.01	49 Unit	67.00	94 Unit	580.01						
		7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	110 Unit	55 Unit						55 Unit	25.00	55 Unit	17.00	110 Unit	42					
		8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	10 Unit	5 Unit			5 Unit	23.00						10 Unit	23					
		9	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah gedung kantor yang direhab	5 Unit	1 Unit	1 Unit	234.00	1 Unit	274.00	1 Unit	199.00		1 Unit	150.00	5 Unit	857					
		10	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	1 unit	1 Unit	6 Unit	2,581.00	0	-	0	-	0	-	0	1 Unit	2581					
		11	Penyediaan Sarana Kearsipan	Jumlah Sarana Kearsipan	11 Unit									11 Unit	34.00	11 Unit	34					
		3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	85%	100%	100%	90.00	100%	106.00	96%	123.00	0%	-	0%	-	59%	319	Dinas PMD			
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	370 Stel	90 Stel	90 Stel	47.00	90 Stel	55.00	90 Stel	64.00		-	-	370 Stel	166					
		2	Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	370 psg	90 Stel	90 Stel	43.00	90 Stel	51.00	90 Stel	59.00		-	-	370 Stel	153					
		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	100%	100%	100%	132.00	100%	155.00	93%	155.00	100%	127.05	100%	107.99	99%	677	Dinas PMD			
		1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	252 Orang	73 org	73 org	117.00	73 org	137.00	45 org	137.00	49 org	105.00	12 org	90.00	252 org	586				



Tujuan	Sasaran	NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA	LOKASI		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		2	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur senam dan pengajian	488 Orang	97 Orang	97 Orang	15.00	97 Orang	18.00	97 Orang	18.00	97 Orang	22.05	100 Orang	17.99	488 Orang	91.04				
		5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan	100%	100%	100%	354.00	100%	413.97	94%	1,161.77	100%	531.00	100%	451.35	99%	2,912	Dinas PMD			
		1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	41.00	4 Laporan	47.97	4 Laporan	48.00	0	-	0	-	16 Laporan	136.97				
		2	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	Jumlah peLaporan Keuangan	10Laporan	2 Laporan	2 Laporan	32.00	2 Laporan	37.00								69				
		3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan, semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah peLaporan Keuangan triwulan, semesteran dan akhir tahun yg disusun	6 Laporan	3 Laporan					3 Laporan	37.00			3 Laporan	119.35	6 Laporan	156.35				
		4	Rapat Teknis dalam rangka Koordinasi & Sinkronisasi Program/Kegiatan PMD se- Provinsi Riau	Jumlah Aparatur PMD Kab & Kota yang mengikuti Rakornis	250orang	50 orang	50 orang	234.00	50 orang	274.00								508				
		5	Rapat Koordinasi Pada setiap SKPD	Jumlah ASN PMD Kab dan Kota yang mengikuti Rakornis	150 orang	50 orang					50 orang	271.00	50 orang	130.00	0	-	150 orang	401				
		6	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	Jumlah Dokumen Renja SKPD yang disusun	6 Dok	2 Dok	2 Dok	47.00	2 Dok	55.00	1Dok	55.77			1Dok	46.00	6 Dok	203.77				
		7	Penyusunan rencana strategis (RENSTRA) SKPD	Jumlah Dokumen Renstra SKPD yg disusun	1 Dok	1 Dok									1Dok	65.00	1 Dok	65				
		8	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan dan Hasil Program/Kegiatan	3 Dok	1Dok					1Dok	750.00	1dok	401.00	1Dok	221.00	3 Dok	1372				



Tujuan	Sasaran	NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA	LOKASI		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Rasio desa tertinggal di Provinsi Riau		6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase tingkat swadaya masyarakat dalam pembangunan (dari Total Pendapatan Desa)	10%	0%	3%	5,718.41	3%	8,078.73	0.1%	2,659.96	0.1%	2,900.00	0.1%	2,947.86	10%	22,167	Dinas	PMD		
		1	Peningkatan Kapasitas Pengurus LPM	Jumlah Pengurus LPM yang mengikuti Peningkatan Kapasitas	1000 orang	200 Org	200 org	400.00	200 org	550.00			550 Org	750.00	50 Org	250.00	1000 orang	1950				
		2	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan (PKK)	Jumlah pengurus yang dibina mengikuti peningkatan kapasitas	1620 orang	200	200	420.00	200	605.00	150 orang	985.00	500 org	950.00	570 org	1,112.00	1620 orang	4072				
		3	Pelatihan Pelatih Kader Pemberdayaan Masyarakat se Provinsi Riau	Jumlah Aparatur yang dilatih menjadi Pelatih KPM	200 org	100 org	100 org	325.00	100 org	515.73							200 org	840.73				
		4	Bulan Bakti Gotongroyong Masyarakat (BB-GRM) Tk. Provinsi.	Jumlah kab/kota yang mengikuti bulan bakti gotong royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Provinsi Riau	12 Kab/ Kota	500 org	500 org	538.00	500 org	400.00	12 Kab/Kota	450.00	12 Kab/Kota	350.00	12 Kab/Kota	400.00	12 Kab/ Kota	2138				
		5	Penilaian Lomba Pelaksanaan Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Riau	Cakupan Kab/Kota yang mengikuti Lomba Pelaksanaan Gotong Royong Tkt Provinsi Riau	12 Kabkota	0	0	-	12 Kab/Kota	320.00							12 Kab/Kota	320				
		6	Pelatihan Metodologi Bagi Pelatih Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Muda	Jumlah Aparatur yang dilatih mejnadi Pelatih Metodologi Pemebrdayaaan Masyarakat, Tingkat Muda, Madya, dan Utama	136 orang	50	50	275.00	86	460.00							136 orang	735				
		7	Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Peserta Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat se Provinsi Riau	Cakupan Kab/Kota yang mendapatkan Pembinaan Monotoring dan Evaluasi	12 Kabkota	12 kab/kota	0	-	12 kab/kota	250.00							12 Kabkota	250				



Tujuan	Sasaran	NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN											UNIT KERJA	LOKASI		
							Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		8	Study Sistem Nilai-nilai Budaya Masyarakat	Dokumen/Naskah Sistem	1 Dok	1 Dok	1 Dok	420.00	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Dok	420		
			Tempatan terhadap Pembangunan di Provinsi Riau.	nilai-nilai Budaya Masyarakat																
				Tempatan terhadap Pembangunan di Provinsi Riau																
		9	Peningkatan Kapasitas Pengurus Kerapatan Adat di Provinsi Riau	Jumlah Pengurus Kerapatan Adat yang mengikuti Peningkatan Kapasitas	376 orang	176	176	350.00	200	430.00							376 orang	780		
				Peningkatan Kapasitas																
		10	Monitoring Penetapan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Riau.	Cakupan Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan melalui Monitoring	12 Kab/kota	12 Kab/kota	0	-	12	300.00							12 Kab/kota	300		
		11	Peningkatan Kapasitas Pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) se Prov. Riau	Jumlah Pengurus Lembaga Adat yang mengikuti Peningkatan Kapasitas	138 org	118 org						118 org	250.00	100 org	350.00	138 org	600			
		12	Pemetaan Kebutuhan TTG Perdesaan	Tersusunnya buku profil TTG Kab/Kota dan Peta Tematik Kebutuhan Pengembangan TTG di Provinsi Riau	12 Kab/kota	3 kab	3 Kab	290.00	3 Kab	363.00							12 Kab/kota	653		
		13	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Posyantek	Jumlah aparat/pengurus posyantek yang mengikuti peningkatan kapasitas	170 Orang	80 org	80 org	95.00	90 org	200.00							170 Orang	295		
		14	Monitoring dan Evaluasi Posyantek	Cakupan Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan melalui Monitoring	12	12	12	120.00	12	200.00							12	320		
		15	Lomba Posyantek Tingkat Provinsi Riau	Jumlah peserta lomba POYANTEK	12	12	12	125.00	12	250.00							12	375		



Tujuan	Sasaran	NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA	LOKASI		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		16	Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Riau	Jumlah peserta lomba inovasi TTG	200 orang	50 org	50 org	45.00	75 org	350.00	75 karya	283.00						200 orang	778				
											Ilmiah dan Penemuan alat TTG												
											12 kab/Kota												
		17	Orientasi Manajemen Posyantek	Jumlah pengurus posyantek yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan posyantek	190 orang	90 org	90 org	295.00	100 org	385.00								190 orang	680				
		18	Sosialisasi HAKI Bagi Inovator dan Pengelola Posyantek se- Provinsi Riau	Jumlah Inovator dan Pengelola Posyantek TTG yang mengikuti sosialisasi Haki	210 orang	0	100 org	310.00	110 org	345.00								210 orang	655				
		19	Pembangunan Pusat Informasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna Provinsi Riau	Jumlah dan Jenis informasi peralatan TTG yang tersedia	2 paket	1 paket	1 paket	330.00	1 paket	440.00								2 paket	770				
		20	Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Riau	Jumlah Kab/Kota yang mengikuti kegiatan Gelar TTG	12 Kab/kota	1 kegiatan	12 kab /kota	380.00	12 kab /kota	605.00								12 Kab/kota	985				
		21	Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional	Jumlah Kab/Kota yang mengikuti kegiatan Gelar TTG	Prov Riau dan 12 kab /kota /ta hun	1 kegiatan dan 12 kab /kota /ta hun	Prov Riau dan 12 kab /kota	525.41 dan 12 kab /kota	Prov Riau dan 12 kab /kota	660.00 dan 12 kab /kota	12 Alat TTG Unggulan Prov. Riau	600.00	12 Alat TTG	500.00	12 Kab/Kota	387.86	Prov Riau dan 12 kab /kota /ta hun	2673.27					
		22	Gelar Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kab/Kota yang mengikuti kegiatan Gelar TTG	Prov Riau dan 12 kab /kota /ta hun	1 kegiatan dan 12 kab /kota /ta hun	0	- 0	- 0	- 0	- 0						12 kab/kota	0					
		23	Pemasyarakatan dan Penguatan Kelembagaan Program Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (PAMSIMAS)	Jumlah Pengurus Pengelola BP SPAMS yang mengikuti penguatan kapasitas	280 Orang	110	110	375.00	110	450.00						60 Orang	200.00	280 Orang	1025				
		24	Perlombaan Desa dan Kelurahan	Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Riau	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota					12 Kab/Kota	159.96						12 Kab/Kota	159.96				



Tujuan	Sasaran	NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA	LOKASI		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		25	Peningkatan Pelayanan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)	Jumlah Kab/Kota yang dibina dan mendapatkan Peningkatan Pelayanan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota					12 Kab/Kota	182.00	12 Kab/Kota	100.00	12 Kab/Kota	110.00	12 Kab/Kota	392				
		26	Fasilitasi Percepatan dan Pembedayaan Masyarakat diwilayah Perhutanan Sosial Pedesaan Provinsi Riau	Jumlah Kabupaten yang difasilitasi dalam percepatan perhutanan sosial Pedesaan	10 Kabupaten	10 Kabupaten									0	-	10 Kab.	7,500				
		27	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Riau (KP-SPAMS)	Jumlah Kelompok KP-SPAM yang difasilitasi	10 KP-SPAMS	10 KP-SPAMS									0	-	10 KP-SPAMS	7,500				
		28	Penyusunan Kebijakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Dokumen Kebijakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 Dok	2 Dok									0	-	2	650				
		29	Pembinaan Administrasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) se Provinsi Riau/Pendamping Desa	Jumlah Kabupaten yang mendapatkan pembinaan administrasi pendampingan desa	10 kab	10 kab									10 kab	138.00	10 kab	138				
		7	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Rasio tingkat swadaya masyarakat dalam pembangunan Desa	20%	5%	3%	2,440.45	3%	2,374.52	0%	-	0%	-	0%	-	1%	4,815	Dinas PMD			
		1	Pembinaan Administrasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PAP PNPMP) se Provinsi Riau	Jumlah Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang dibina Tim Koordinasi PNPMP Mandiri Perdesaan se Provinsi Riau	9 Kab 69 Kec 887 Desa	9 Kab 69 Kec 887 Desa	9 Kab 69 Kec 887 Desa	910.45	0	-	0	-	0	-	0	-	-	910.45				
		2	Perlombaan Desa dan Kelurahan	Cakupan Kab/Kota yang dikitsertakan dalam penilaian Lomba Desa/Kelurahan	12 Kab/kota	12 Kab/kota	12 Kab/kota	455.00	12 Kab/kota	874.00	0	-	0	-	0	-	12 Kab/kota	1329				



Tujuan	Sasaran	NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA	LOKASI		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		3	Penyusunan, Pendayagunaan dan validasi Data Profil Desa/Kelurahan Provinsi Riau	Jumlah Peserta POKJA Profil Kabupaten, kecamatan dan Desa yang mengikuti pelatihan penyusunan, validasi, dan pendayagunaan data Profil Desa	600 orang	300 Desa	300 Org	925.00	300 Org	1,325.52	0	-	0	-	0	-	600 orang	2250.52				
		4	Peningkatan Pelayanan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)	Cakupan Kab/Kota yang mendapatkan fasilitasi dalam peningkatan pelayanan Unit Pengaduan Masyarakat	12 Kab/Kota	0	100%	150.00	100%	175.00	0	-	0	-	0	-		325				
		8	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Tingkat Kapasitas aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa (Pemerintah Desa yang akuntabel)	35%	5%	3%	6,074.56	3%	7,552.05	10%	1,872.06	10%	6,848.80	35%	2,074.69	35%	23786.16	Dinas PMD			
		1	Penyusunan Data Profil Desa/Kelurahan	Jumlah Desa / Kelurahan yang difasilitasi dalam Rangka Penguatan Profil desa/ kelurahan	164 Data	164 Data	164 Data	994.56	0	-	0	-	0	-	10 Desa/12 Kelurahan (36 Orang)	100.00	0	1094.56				
		2	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa se Provinsi Riau	Jumlah Aparatur Desa/Kel yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3415 org	1850 Org	1850 Org	1,280.00	615 Org	2,353.05	950 Org	1,572.06					3415 org	5205.11				
		3	Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) Manajemen Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur yang dilatih menjadi Pelatih Manajemen Pemdes	120 org	60 Org	60 Org	340.00	60 Org	400.00							120 org	740				
		4	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Sosialisasi UU Desa	310 org	50 Org	50 Org	210.00	50 Org	250.00	210 Org	300.00					310 org	760				
		5	Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Jumlah Pengurus BPD yg mengikuti Peningkatan Kapasitas dan terpilihnya BPD Terbaik tingkat Provinsi Riau	1355 org	200 Orang	200 Org	350.00	200 Org	550.00			455 Org	1,250.00	40 Orang, 30 BPD Terbaik	250.00	1355 org	2400				



Tujuan	Sasaran	NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA	LOKASI		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		6	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa/Perdes (Legal Drafting Perdes)	Jumlah Aparatur yang difasilitasi dim penyusunan Perdes	213 org	90 Org	90 Org	310.00	123 Org	450.00							213 org	760				
		7	Rapat Koordinasi Penyerahan Kewenangan Urusan Kab/Kota kepada Desa/Kelurahan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Rakor Penyerahan Kewenangan	140 org	70 org	70 org	340.00	70 org	479.00							140 org	819				
		8	Penyusunan Naskah Akademis dan Draf RANPERDA Desa Adat	Dokumen Naskah Akademis dan Ranperda Desa Adat	1 Dok	1 Dok	0	-	1Dok	550.00	0	-	0	-	0	-	1 Dok	550				
		9	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Desa Mandiri	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Desa Mandiri	1 Dok	1 Dok	1Dok	550.00	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Dok	550				
		10	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Aparatur Desa yang mendapatkan BIMTEK Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa		0	120 Org	320.00	180 Org	475.00			600 org	1,898.00			-	2693				
		11	Bimbingan Teknis LPPD dan LKPJ Desa	Jumlah Aparatur Desa yang mendapatkan BIMTEK Penyusunan LPPD dan LKPJ	300 org	120 org	10 Kab	320.00	10 Kab	475.00							300 org	795				
		12	Bimbingan Teknis Penyusunan RPJMDes dan RKPDes Bagi Aparatur Desa se- Provinsi Riau	Jumlah Aparatur Desa yang mendapatkan BIMTEK Penyusunan RPJMDes dan RKPDes	650 org	120 Orang	120 Orang	280.00	180 Orang	420.00			300 org	1,000.00	50 Orang	212.00	650 org	1912				
		13	Pembinaan terhadap Kab/kota dalam rangka Pemberian Dana Desa	Cakupan Kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan dalam rangka Pemberian Dana Desa	12 kab/kota	12 kab/kota	12 kab/kota	230.00	12 kab/kota	300.00							12 kab/kota	530				
		14	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Cakupan Kab/Kota yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	12 kab/kota	12 Kab	12kab	320.00	12 kab/kota	550.00							12 kab/kota	870				





Tujuan	Sasaran	NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA	LOKASI		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		15	Pembinaan terhadap Kabupaten/kota dalam rangka penataan wilayah desa	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dalam rangka penataan wilayah desa dan kelurahan	12 kab/kota	10kab	10kab	230.00	10 kab/kota	300.00					12 Kab/Kota	75.69	10kab	605.69				
		16	Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang di evaluasi perkembangannya Sesuai dengan Kategori Penilaian	12 Kab/kota	12 Kab/kota							12 Kab/kota	200.80	10 desa, 12 Kel	274.00	12 Kab/kota	474.8				
		17	Bimbingan Teknis PTPD (Pembina Teknis Pemerintahan Desa)	Jumlah Aparat kecamatan dan PMD yang mendapatkan workshop PTPD	10 Kab	10 Kab									-	10 Kab	0					
		18	Raker Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Jumlah peserta Rapat Kerja Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	750 org	250 org							250 org	500.00	156 org	175.00	750 org	675				
		19	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Desa yang mengikuti pelatihan manajemen pemerintahan desa	1120 org	560 org							560 org	1.500.00	50 org	150.00	1120 org	1650				
		20	Bimbingan Teknis Manajemen aset Desa	Jumlah Peserta Aparatur desa yang mengikuti bimtek manajemen aset desa	310 org	150 org							150 org	500.00	90 org	202.00	310 org	702				
		21	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Peserta Aparatur desa yang mengikuti bimtek	310 org	150 org							150 org	500.00	100 org	220.00	310 org	720				
		22	Peningkatan Kapasitas Pendamping profesional Desa Se Provinsi Riau	Jumlah Pendamping Profesional Desa yang Mengikuti Pelatihan	150 org	150 org									147 Orang	342.00	150 org	150 org				
		23	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Laporan Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	1 laporan/ dokumen	1 laporan/ dokumen									1Dokumen	74.00	1 laporan/ dok					



Tujuan	Sasaran	NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA	LOKASI		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		9	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah Lembaga Ekonomi pedesaan yang berkembang (BUMDes, Pasar Desa dan POSYANTEK)	Bumdes 50 Pasar Desa 50 Posyantek 30	- - -	3% - -	426.10	779,677.57	747.33	1,280.00	828.22	150	782,827	Dinas								
		24	Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa se - Provinsi Riau	Jumlah Pengelola Pasar Desa yang mengikuti BIMTEK	240 desa	40 desa	10 Kab 40 Desa 80 Org	110.00	447,410.00	10 Kab 50 Desa 100 Org	110.00	130.00	20 Desa	346.00	240 desa	448106							
		25	Rakor Pasar Desa se-Propinsi Riau	Jumlah Stake Holder/Pemerintah Kab yang mengikuti Rakor Pasar Desa	120 org	60 org	10 kab 60 Org	105.10	4,878.00	10 kab 60 Org					120 org	4983.1							
		26	Bimbingan Teknis Pengelolaan Bumdes se-Propinsi Riau	Jumlah Pengelola BUMDes yang mengikuti BIMTEK	222 org	60 org	10 Kab 30 Desa 60 Org	116.00	325,275.00	10 Kab 81 Desa 162 Org					222 org	325391							
		27	Monitoring Evaluasi Bumdes Se-Propinsi Riau	Cakupan Kab/Kota yang mendapatkan Pembinaan BUMDes melalui Monitoring dan Evaluasi	10 kab	10 kab	10 kab	95.00	2,114.57	10 kab					10 kab	2209.57							
		28	Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan BUM Desa se-Propinsi Riau	Jumlah Pengurus BUM Desa yang di Bina	780 org	180 org				180 org	637.33	300 org	950.00	50 org	350.22	780 org	1937.55						
		29	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Posyantek	Jumlah Aparatur/pengurus posyantek yang mengikuti peningkatan kapasitas	120 org	60 org						60 org	200.00	0	-	120 org	200						
		30	Lomba Posyantek Tingkat Provinsi Riau	Jumlah Kab/Kota yang mengikuti lomba Posyantek Tingkat Prov. Riau	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota								0	-	12 Kab/Kota	0						
		31	Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Posyantek	Jumlah posyantek Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota								0	-	12 Kab/Kota	0						



Tujuan	Sasaran	NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA	LOKASI		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		32	Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Riau	Jumlah Kabkota yang mengikuti gelar TTGTk. Provinsi	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota									0	-	12 Kab/Kota	0				
		33	Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional	Jumlah alat TTG dari Kab/Kota yang diikutsertakan pada Gelar TTG Nasional	12 Alat	12 Alat									0	-	12 Alat	0				
		34	Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Riau	Jumlah Peserta yang mengikuti lomba inovasi TTG tingkat Provinsi											0	-						
		35	Pemetaan Pembangunan Kawasan Pedesaan	Jumlah Dokumen Pemetaan Pembangunan Kawasan Pedesaan	1 Dok	0									1Dok	132.00	1Dok	250				
		10	<b>Program Pengembangan Data Informasi</b>	<b>Persentase ketersediaan data/informasi (%)</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>					<b>50%</b>	<b>623.04</b>			<b>-</b>	<b>-</b>		<b>623</b>	<b>Dinas</b>			
		1	Penyusunan Data dan Informasi																<b>PMD</b>			
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Penyusunan Data dan Informasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa	1Dokumen	0					1Dokumen	623.04			-	1Dokumen	623.04					
		11	<b>Program Pengembangan Komunitas Perumahan Pedesaan</b>	<b>Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapatkan Pengembangan resetlemen di Kab/Kota (%)</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>6604</b>	<b>-</b>	<b>6621</b>	<b>13,221.44</b>												
		1	Pembangunan Rumah Layak Huni	Jumlah Keluarga miskin yang mendapat bantuan Rumah Layak Huni (RLH)					6621	13,221.44												
		12	<b>Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan</b>	<b>terlaksananya Resetlemen Pemukiman (Kegiatan)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>16,836.19</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>													



Tujuan	Sasaran	NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA	LOKASI
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1	Pembangunan Resetlement Desa	Jumlah Desa/Kel di Kab/Kota mendapatkan bantuan pembangunan resetlement desa pembangunan	25	0	5	8,411.19	6											
				Desa/Kel			Desa/Kel	Desa/Kel												
		2	Pelatihan pertanian, perikanan bagi masyarakat lokasi pembangunan resetlemen	Jumlah Pelatihan pertanian, perikanan bagi masyarakat lokasi pembangunan resetlemen	0	110	175.00	110												
		3	Manajemen dan Pengendalian Pembangunan Restelement Desa	Cakupan Desa/Kel di Kab/Kota yang terekendali dalam pembangunan resetlemen desa/kel		5	8,250.00													
		13	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Jalan Pedesaan</b>	<b>Jumlah desa/kel yang mendapatkan pembangunan dan pengembangan Jalan Lingkungan Desa di Kab/Kota (%)</b>	<b>1,637</b>		<b>579,764.08</b>	<b>1637</b>	<b>194,078.59</b>											
		1	Semenisasi dan Pengerasan Jalan lingkungan desa/kel di Kab/Kota	Jumlah Desa/Kel yang mendapatkan bantuan Semenisasi dan Pengerasan Jalan lingkungan desa/kel di Kab/Kota				1637	194,078.59											
		14	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan</b>	<b>Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Kumuh di Pedesaan (Kawasan)</b>	<b>10%</b>		<b>289,882.04</b>		-											
		1	Semenisasi jalan Lingkungan Di Kota Dumai (33 Kel x 200 Ji)	Terlaksananya Semenisasi jalan Lingkungan Di Kota Dumai		33 Kel	6,600.00													
		2	Pengerasan Jalan dalam Desa Di kab Kampar	Terlaksananya Pengerasan Jalan Dalam Desa Di Kab Kampar		242 Desa	33,460.00													



Tujuan	Sasaran	NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA	LOKASI
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3	Pengerasan Jalan dalam Desa Di kab Bengkalis	Terlaksananya Pengerasan Jalan Dalam Desa Di Kab Bengkalis			136 Desa	28,680.00												
		4	Pengerasan Jalan dalam Desa Di kab Rokan Hulu	Terlaksananya Pengerasan Jalan Dalam Desa Di Kab Rokan Hulu			144 Desa	27,720.00												
		5	Pengerasan Jalan dalam Desa Di kab Rokan Hilir	Terlaksananya Pengerasan Jalan Dalam Desa Di Kab Rokan Hilir			159 Desa	27,670.00												
		6	Semenisasi jalan Lingkungan Di Kepulauan Meranti (101 Desa/ Kel x 200 Jt)	Terlaksananya Semenisasi jalan Lingkungan Di Kepulauan Meranti			101 Desa	20,200.00												
		7	Pengerasan Jalan dalam Desa Di kab Siak	Terlaksananya Pengerasan Jalan Dalam Desa Di Kab Siak			122 Desa	27,552.04												
		8	Pengerasan Jalan dalam Desa Di kab Indra Giri Hulu	Terlaksananya Pengerasan Jalan Dalam Desa Di Kab Indra Giri Hulu			178 Desa	27,140.00												
		9	Pengerasan Jalan dalam Desa Di kab Indra Giri Hilir	Terlaksananya Pengerasan Jalan Dalam Desa Di Kab Indra Giri Hilir			198 Desa	31,740.00												
		10	Pengerasan Jalan dalam Desa Di kab Kuantan Sengingi	Terlaksananya Pengerasan Jalan Dalam Desa Di Kab Kuantan Sengingi			218 Desa	31,340.00												
		11	Pengerasan Jalan dalam Desa Di kab Pelalawan	Terlaksananya Pengerasan Jalan Dalam Desa Di Kab Pelalawan			106 Desa	27,780.00												
			<b>JUMLAH</b>				-	618,812.79	-	1,009,631.87	-	10,989.08	-	14,222.15	-	8,882.56		857,698		



## KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini akan menerangkan dan menggambarkan bagaimana indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau secara langsung menunjukkan kinerja dalam periode 2014-2019 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Riau. Berikut adalah tabel yang menggambarkan Indikator kinerja dari perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Riau.

Dengan adanya perubahan regulasi tentang desa yakni lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta perubahan regulasi tentang Pemerintah Daerah yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maka pemerintah Pemerintah Provinsi Riau melalui peran Pembinaan dan Pengawasan kepada Desa serta melihat dan mempertimbangkan isu-isu tentang desa, menginginkan urusan Pemberdayaan masyarakat dan Desa lebih fokus dan terarah sehingga indikator kinerja daerah tentang desapun di rubah menjadi, seperti tabel berikut:

Tabel T-C.28  
Indikator Kinerja Dinas PMD yang Mengacu pada Tujuan Sasaran  
Perubahan RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Menurunnya Persentase desa tertinggal di Provinsi Riau	55%	55%	50%	45%	40%	35%	35%
2	Bertambahnya jumlah desa mandiri di Provinsi Riau	0	0	10	10	10	10	40

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau tahun 2014-2019 merupakan arah bagi seluruh unit kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya serta berbagai gagasan pengembangan dalam rangka penguatan dan peningkatan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau di masa mendatang. Revisi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau memuat perubahan Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi serta Rencana Program maupun Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau dalam kurun waktu 2015-2019.

Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi pada Revisi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau disusun guna mendukung Visi Gubernur Riau, sesuai lingkup Tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau. Dengan komitmen dan kerbersamaan kita bersama, diharapkan berbagai upaya yang dilakukan dapat mewujudkan harapan yang dituju guna pencapaian berbagai keinginan masyarakat di Provinsi Riau di masa depan.

Selanjutnya guna menjaga sinkronisasi dan konsistensi perencanaan program/kegiatan, dokumen Revisi Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau.

Pekanbaru, Februari 2018

**KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI RIAU,**



**Drs. H. SYARIFUDDIN. AR., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP : 19620504 198803 1 006

